



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2021-2026**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021-2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta beberapa program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 mendatang.

Pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf atas bantuan dalam rangka penyelesaian penyusunan Perubahan Renstra dan tak lupa juga kami sampaikan terima kasih atas sumbang saran, kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaan/perbaikan Renstra.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Benteng, 1 Agustus 2023
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19800422 199912 1 003



DAFTAR ISI

Halaman Sampul		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	13
	1.4. Sistematika Penulisan	13
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
	2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	59
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	59
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	60
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	65
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	70
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	88
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN	90
	4.1. Tujuan	90
	4.2. Sasaran	91
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	97
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	109
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	183
Bab VIII	PENUTUP	185

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2020	31
Tabel 2.2.	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2020..	32
Tabel 2.3.	Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021.....	32
Tabel 2.4.	Data Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.5.	Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	37
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	43
Tabel 2.7	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	46
Tabel 2.8	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	47
Tabel.2.9	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	48
Tabel 2.10	Persentase PKK Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	48
Tabel 2.11	Persentase LSM Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	49
Tabel. 2.12	Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	50
Tabel. 2.13	Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	50
Tabel. 2.14	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	52
Tabel. 2.15	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	53
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	55
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar	63
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia	67
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas	70

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan	
Tabel 3.4	Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan	81
Tabel 3.5	Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar	82
Tabel 3.6	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	83
Tabel 3.7	Status Air Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar ...	84
Tabel 3.8	Proyek Volume Air Kabupaten Kepulauan Selayar	85
Tabel 3.9	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	86
Tabel 3.10	Status Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar	87
Tabel 3.11	Proyeksi Volume Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	87
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	92
Tabel 4.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	93
Tabel 4.3	Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggungjawab Gerbang Sari Sesuai Target Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	95
Tabel 4.4	Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggungjawab Gerbang Sari Sesuai Target Peningkatan Status Desa Maju di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	96
Tabel 5.1	Analisis SWOT Pengembangan Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	101
Tabel 5.3	Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	104
Tabel 5.4	Deskripsi Kegiatan Terkait Dimensi GERBANG SARI	108
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar	110
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	132
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.....	154
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026	184
Tabel 7.2.	Penetapan Target Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2021-2026	184

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar dan dibuat untuk diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan (RPJMD) ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DIS.PMD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun dan menetapkan Renstra DIS.PMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra DIS.PMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DIS.PMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, yang secara prinsip operasional keseluruhan program yang ada didalam Renstra harus konsisten dan selaras dengan program yang ada di dalam RPJMD. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai outcome (hasil) program, maka kegiatan yang ada pada setiap program mutlak berkontribusi terhadap pencapaian program baik outcome Renstra

maupun outcome RPJMD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 juga dapat menjadi bahan, pedoman dalam pelaksanaan peran pihak-pihak terkait (stakeholder), terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 merupakan acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lima tahun mendatang. Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sejalan dengan amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategik OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis yang dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun juga bertujuan untuk menjaga dan

memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatangi antara kondisi pembangunan yang diinginkan 5 (Lima) tahun ke depan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang di dalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

Penyusunan Rancangan awal Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Tahapan penyusunan Renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Orientasi Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra (pengolahan data dan

informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya, harus ada keterkaitan dan saling mendukung antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, karena pencapaian secara akumulasi pada tingkat Provinsi merupakan kontribusi dari pencapaian keseluruhan Kabupaten/Kota. Demikian pula halnya keterkaitan dengan Pemerintah Pusat, yaitu Renstra Kementerian terkait menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian target nasional terutama pelaksanaan kebijakan baik pada level Kabupaten.

Semua itu membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergik, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintahan dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

- Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Nomor 25);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
34. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh perangkat daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya

- meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi, antar bidang dalam perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan kaidah penyusunan Rencana Strategis tahun 2016-2021 dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Menguraikan penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD

2.1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DIS.PMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

2.1.2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

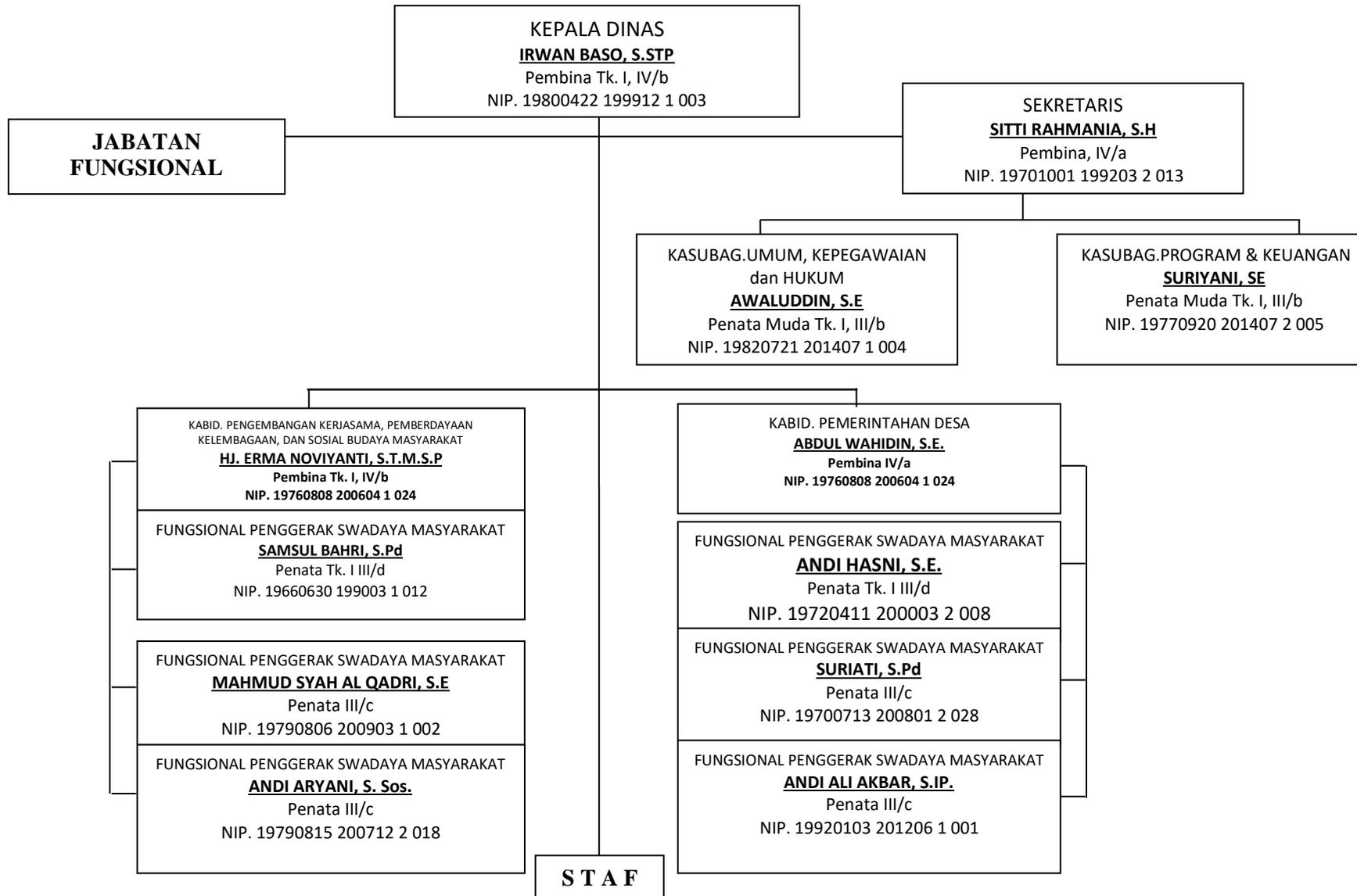
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**



2.1.4.1.Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan perumusan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- g. merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai rencana strategis dinas;
- h. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan Dinas;
- j. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pemerintahan desa;
- k. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

- l. menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan serta koordinasi bidang bina pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.2. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun

- administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;
 - h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.3.Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

- dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
 - f. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - g. melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan
 - h. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - i. Melakukan evaluasi, penilaian, pembimbingan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
 - j. Melakukan pengelolaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.4.Sub Bagian Program dan Keuangan

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya

- f. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- g. memfasilitasi penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan
- i. melakukan kegiatan sosialisasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- j. melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- l. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran
- m. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan
- n. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- o. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- p. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.1.4.5. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengorganisasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan administrasi bina pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi bina pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul pemerintah desa
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, aset desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

- produk hukum desa;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa;
 - k. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis penataan desa;
 - l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan, perubahan status, penetapan dan batas desa;
 - m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam desa adat;
 - n. melakukan pembuatan peta dan batas wilayah desa;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan penamaan desa dan kode desa;
 - p. melakukan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan;
 - q. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan desa;
 - r. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan layanan administrasi pemerintahan desa;
 - s. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan bins kelembagaan pemerintahan desa;
 - t. melakukan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan desa;
 - u. melakukan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa;
 - v. memfasilitasi pelaksanaan badan permusyaratan desa dalam peningkatan ketenteraman dan perlindungan masyarakat desa;
 - w. melakukaan pembinaan dalam pelaksanaan peran rukun warga, rukun tetangga, dusun, dalam pnyelenggaraan pemerintahan desa;

- x. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina keuangan dan asset desa;
- y. melakukan perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa;
- z. memfasilitasi pelaksanaan transfer dana desa;
- aa. melakukan penataan dan pemanfaatan asset desa;
- bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- dd. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang bina pemerintahan desa dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.6. Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan, Kerjasama Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan,

pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kerjasama usaha badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara

- i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Kerjasama antar desa dengan Lembaga non pemerintah bidang kesatuan bangsa, kebencanaan dan kedaruratan
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan Kerjasama, kelembagaan dan social budaya masyarakat meliputi pengembangan desa dan adat desa, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Kerjasama desa, kelembagaan dan social budaya masyarakat;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan social dasar, peningkatan kesejahteraan social, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat istiadat, dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat, budaya nusantara, kerukunan dan ketentraman desa;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan desa;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan pelaksanaan

- orientasi pengembangan kapasitas Pembina desa, aparat desa dan perangkat desa dibidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, dan pembangunan desa;
- p. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa;
 - q. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pelaksanaan kerjasama pemerintah desa adat dalam pengembangan ekonomi, social budaya, pembangunan, dan Lembaga non pemerintah;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
 - s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pekan inovasi perkembangan desa;
 - t. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perkembangan desa dan desa adat dibidang pemerintahan, kewilayahan, dan Lembaga kemasyarakatan;
 - u. melaksanakan penyiapan bahan Analisa, validasi, peninjauan, klarifikasi dan pemeringkatan tingkat perkembangan desa;
 - v. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlombaan desa dan desa adat;
 - w. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pelaksanaan kebijakan penyusunan profil dan data desa;
 - x. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebijakan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - y. mengoordinasikan dan pembinaan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - z. Menghimpun dan mengadakan pembinaan dan pendayagunaan teknologi pedesaan;

- aa. Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- bb. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- cc. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pengembangan Kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan, dan social budaya masyarakat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh sesuai bidang tugasnya

2.2. Sumber Daya Dinas PMD

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sumber daya manusia sejumlah 19 orang PNS terdiri dari 10 orang laki-laki dan 9 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 100%. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 68,42% PNS atau sebanyak 13 orang PNS berpendidikan sarjana, 10,52% atau sebanyak 2 orang PNS berpendidikan DIII (Diploma), 15,79% atau sebanyak 3 orang berpendidikan SLTA. Berdasarkan golongan kepangkatan, sebanyak 94,74% atau 18 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 5,26% atau 1 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/b. Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan PNS Kabupaten Kepulauan Selayar, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 34 Pegawai, sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 15 orang. Oleh karena itu diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar ke depannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sebanyak 19 PNS orang dengan jenis jabatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
4. Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat
5. Kepala Sub Bagian Program, Hukum, dan Keuangan
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Tenaga Fungsional penggerak swadaya masyarakat : 6 Orang
8. Penata Laporan Keuangan (Bendahara Pengeluaran): 1 Orang
9. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Pengurus Barang) : 1 Orang
10. Pengadministrasi Umum : 3 orang
11. Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa :1 orang
12. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa : 1 Orang

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	KONTRAK	SUKARELA	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	1	2	-	11	-	14
4	D III	-	-	2	-	1	-	3
5	S1	-	-	9	4	12	-	25
6	S2	-	-	-	1	-	-	1
7	S3	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		1	13	5	24	-	43

Sedangkan jika dilihat dari struktur jabatannya, maka sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2023

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	2
4	Jabatan Fungsional	6
5	Staf PNS	9
6	Staf Kontrak	24
7	Staf Sukarela	-
	Jumlah	43

2.2.2.Sarana dan Prasarana (Asset dan Modal)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sarana / prasarana dengan susunan Perlengkapan sebagai berikut :

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 2.3 :

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	14 unit	Layak
4	Komputer Pc	10 Unit	Layak
5	Laptop	14 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Kipas angin	1 Unit	Rusak berat
8	Meja Rapat	1 buah	Layak
9	Meja Tulis	23 buah	Layak
10	Kursi vertu	22 buah	Rusak berat
11	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
12	Kursi Putar	15 Buah	Layak
13	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
14	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
15	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
16	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
17	Sofa	6 Unit	Layak
18	Alat-alat studio	1 set	Layak
19	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
20	Televisi	4 Unit	Layak
21	Kamera	1 Unit	Layak
22	Printer	13 Buah	Layak
23	Kulkas	2 Buah	Layak

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata – rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran yaitu Opini Atas LK Daerah,

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)

Sasaran Strategis 4, Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah dengan indikator sasaran Transmigran Lokal (KK)

Sasaran Strategis 5, Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran % Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal,

Sasaran Strategis 6, Berkurangnya penduduk miskin dengan

indikator kinerja % Angka Kemiskinan

Sasaran Strategis 7, Meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator sasaran Income per Kapita Penduduk (juta),

Sasaran strategis 8, Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran strategis 9, Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan dengan indikator sasaran Meningkatnya Jumlah dan Peran Koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Indikator sasaran % Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal, diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022–2026, Sasaran-2 Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri. Selain itu, intervensi juga diarahkan untuk mengeluarkan desa dengan status sangat tertinggal yang saat ini berjumlah 3 (tiga) desa di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan meningkatkan statusnya.

Tabel 2.4.
Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa Mandiri	0	0	0	0	0
2	Desa Maju	0	2	1	1	3
3	Desa Berkembang	11	40	41	41	41
4	Desa Tertinggal	56	37	37	37	34
5	Desa Sangat Tertinggal	14	2	2	2	3
Jumlah		81	81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2016-2021) perkembangan status desa cukup baik, dimana pada tahun tertentu terjadi peningkatan jumlah status desa maju, serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa sangat tertinggal.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27-0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Berikut basis data desa berdasarkan status desa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 2 tahun terakhir (tabel 2.5):

Tabel 2.5
Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2020

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Bontoharu	Bontosunggu	0,7257	0,7714	0,6833	0,7167	0,4667	0,4667	0,6252	0,6516	Berkembang	Berkembang
2	Bontoharu	Bontoborusu	0,7143	0,68	0,4833	0,55	0,6000	0,6	0,5992	0,6100	Berkembang	Berkembang
3	Bontoharu	Bontolebang	0,7429	0,6114	0,4500	0,55	0,6667	0,6667	0,6198	0,6094	Berkembang	Berkembang
4	Bontoharu	Bontotangga	0,6914	0,7314	0,6167	0,6833	0,6667	0,2667	0,6583	0,5605	Berkembang	Tertinggal
5	Bontoharu	Kahu-Kahu	0,6914	0,6229	0,5333	0,6	0,6000	0,6	0,6083	0,6076	Berkembang	Berkembang
6	Bontoharu	Kalepadang	0,6343	0,7429	0,5000	0,65	0,6000	0,4	0,5781	0,5976	Tertinggal	Tertinggal
7	Bontomatene	Pamatata	0,5886	0,6457	0,5833	0,5667	0,6667	0,6	0,6129	0,6041	Berkembang	Berkembang
8	Bontomatene	Tanete	0,6743	0,7086	0,5667	0,6	0,6667	0,6667	0,6359	0,6584	Berkembang	Berkembang
9	Bontomatene	Bongaiyya	0,7143	0,76	0,5833	0,4833	0,6667	0,6667	0,6548	0,6367	Berkembang	Berkembang
10	Bontomatene	Kayu Bauk	0,7371	0,6914	0,5500	0,6	0,6667	0,6	0,6513	0,6305	Berkembang	Berkembang
11	Bontomatene	Barat lambongan	0,7371	0,7771	0,5833	0,5333	0,6667	0,6667	0,6624	0,6590	Berkembang	Berkembang
12	Bontomatene	Bontona Saluk	0,7429	0,7543	0,6500	0,6167	0,6667	0,6667	0,6865	0,6792	Berkembang	Berkembang
13	Bontomatene	Onto	0,7429	0,7829	0,5500	0,6	0,6667	0,6667	0,6532	0,6832	Berkembang	Berkembang
14	Bontomatene	Maharayya	0,7200	0,6914	0,5333	0,5667	0,6667	0,6667	0,6400	0,6416	Berkembang	Berkembang
15	Bontomatene	Menara Indah	0,6571	0,68	0,4167	0,45	0,6667	0,6667	0,5802	0,5989	Tertinggal	Tertinggal
16	Bontomatene	Tamalanrea	0,7029	0,7086	0,6833	0,6167	0,6667	0,6667	0,6843	0,6640	Berkembang	Berkembang
17	Bontomanai	Parak	0,7029	0,7714	0,3833	0,5667	0,6000	0,6	0,5621	0,6460	Tertinggal	Berkembang
18	Bontomanai	Barugaia	0,7943	0,8629	0,5167	0,7833	0,5333	0,6667	0,6148	0,7710	Berkembang	Maju

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
19	Bontomanai	Jambuiya	0,7314	0,6857	0,5333	0,4333	0,6000	0,6667	0,6216	0,5952	Berkembang	Tertinggal
20	Bontomanai	Mare-Mare	0,6343	0,6171	0,4333	0,3833	0,6000	0,6	0,5559	0,5335	Tertinggal	Tertinggal
21	Bontomanai	Polebunging	0,7600	0,7829	0,5667	0,4833	0,6667	0,6667	0,6644	0,6443	Berkembang	Berkembang
22	Bontomanai	Bonea Makmur	0,6343	0,6743	0,5500	0,5167	0,6000	0,6	0,5948	0,5970	Tertinggal	Tertinggal
23	Bontomanai	Bontomarannu	0,6857	0,72	0,4500	0,4333	0,6667	0,6667	0,6008	0,6067	Berkembang	Berkembang
24	Bontomanai	Bonea Timur	0,8171	0,7543	0,6333	0,65	0,6667	0,6667	0,6810	0,6903	Berkembang	Berkembang
25	Bontomanai	Bonto Koraang	0,6857	0,68	0,4833	0,4333	0,6667	0,6	0,6119	0,5711	Berkembang	Tertinggal
26	Bontomanai	Kaburu	0,8171	0,8	0,5000	0,4833	0,6667	0,6667	0,6613	0,6500	Berkembang	Berkembang
27	Bontosikuyu	Harapan	0,6343	0,76	0,6500	0,8167	0,6000	0,5333	0,6281	0,7033	Berkembang	Berkembang
28	Bontosikuyu	Patikarya	0,6457	0,6571	0,4667	0,6667	0,6667	0,4667	0,5930	0,5968	Tertinggal	Tertinggal
29	Bontosikuyu	Patilereng	0,6571	0,6743	0,4500	0,6667	0,6000	0,8667	0,5690	0,7359	Tertinggal	Maju
30	Bontosikuyu	Laiyolo Baru	0,6229	0,6857	0,4667	0,5	0,6667	0,8667	0,5854	0,6841	Tertinggal	Berkembang
31	Bontosikuyu	Laiyolo	0,6343	0,6743	0,7833	0,65	0,6667	0,6	0,6948	0,6414	Berkembang	Berkembang
32	Bontosikuyu	Lantibongan	0,7257	0,6514	0,4833	0,6167	0,6667	0,6667	0,6252	0,6449	Berkembang	Berkembang
33	Bontosikuyu	Binanga Sombaiya	0,6229	0,76	0,4000	0,5	0,6667	0,6667	0,5632	0,6422	Tertinggal	Berkembang
34	Bontosikuyu	Lowa	0,7371	0,7371	0,6500	0,5667	0,6667	0,6	0,6848	0,6346	Berkembang	Berkembang
35	Bontosikuyu	Appatanah	0,5371	0,6571	0,3833	0,4833	0,6000	0,6667	0,5068	0,6024	Tertinggal	Berkembang
36	Bontosikuyu	Tambolongan	0,6229	0,6	0,2500	0,35	0,4667	0,5333	0,4465	0,4944	Sangat Tertinggal	Tertinggal
37	Bontosikuyu	Polassi	0,5943	0,5829	0,3667	0,4333	0,5333	0,4	0,4981	0,4721	Tertinggal	Sangat Tertinggal
38	Bontosikuyu	Khusus Bahuluang	0,6914	0,6629	0,3000	0,3	0,6667	0,6667	0,5527	0,5432	Tertinggal	Tertinggal
39	Pasimasunggu	Bontosaile	0,6057	0,7029	0,4000	0,65	0,6667	0,6667	0,5575	0,6732	Tertinggal	Tertinggal

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
40	Pasimasunggu	Massungke	0,6114	0,5943	0,4667	0,5	0,6667	0,6	0,5816	0,5648	Tertinggal	Tertinggal
41	Pasimasunggu	Tanamalala	0,6057	0,5829	0,3167	0,4333	0,6667	0,6667	0,5297	0,5610	Tertinggal	Tertinggal
42	Pasimasunggu	Ma'minasa	0,5886	0,6571	0,4833	0,45	0,6000	0,6	0,5573	0,5690	Tertinggal	Tertinggal
43	Pasimasunggu	Teluk Kampe	0,5771	0,6514	0,3500	0,4	0,6667	0,6667	0,5313	0,5727	Tertinggal	Tertinggal
44	Pasimasunggu	Kembang Ragi	0,6971	0,6286	0,6000	0,5333	0,6667	0,6	0,6546	0,5873	Berkembang	Berkembang
45	Pasimasunggu	Labuang Pamajang	0,5657	0,5771	0,4500	0,4833	0,6000	0,6667	0,5386	0,5757	Tertinggal	Tertinggal
46	Pasimarannu	Bonerate	0,7371	0,8057	0,7167	0,6	0,6667	0,6667	0,7068	0,6908	Berkembang	Berkembang
47	Pasimarannu	Majapahit	0,7829	0,7657	0,5167	0,5167	0,6667	0,6667	0,6554	0,6497	Berkembang	Berkembang
48	Pasimarannu	Batu Bungkung	0,6457	0,6857	0,2668	0,3667	0,6667	0,6667	0,5263	0,5730	Tertinggal	Tertinggal
49	Pasimarannu	Bonea	0,6800	0,7143	0,4333	0,4167	0,6667	0,6667	0,5933	0,5992	Tertinggal	Berkembang
50	Pasimarannu	lambego	0,7771	0,7771	0,5500	0,5167	0,6667	0,6667	0,6646	0,6535	Berkembang	Berkembang
51	Pasimarannu	Komba-Komba	0,5600	0,6286	0,2667	0,4	0,6667	0,6667	0,4978	0,5651	Tertinggal	Tertinggal
52	Pasimarannu	sambali	0,6457	0,7429	0,2667	0,3833	0,6667	0,6667	0,5263	0,5976	Tertinggal	Tertinggal
53	Pasimarannu	lamantu	0,8057	0,7829	0,5167	0,45	0,6667	0,6667	0,6630	0,6332	Berkembang	Berkembang
54	Taka Bonerate	Kayuadi	0,6343	0,76	0,4500	0,5	0,6667	0,5333	0,5837	0,5978	Tertinggal	Tertinggal
55	Taka Bonerate	batang	0,6400	0,6857	0,4000	0,35	0,6667	0,6667	0,5689	0,5675	Tertinggal	Tertinggal
56	Taka Bonerate	Nyiur Indah	0,6571	0,6629	0,3833	0,4667	0,6667	0,6667	0,5690	0,5987	Tertinggal	Tertinggal
57	Taka Bonerate	Tambuna	0,6628	0,5886	0,3167	0,25	0,6667	0,6667	0,5487	0,5017	Tertinggal	Tertinggal
58	Taka Bonerate	Jinato	0,6286	0,6343	0,3833	0,4667	0,6667	0,6667	0,5595	0,5892	Tertinggal	Tertinggal
59	Taka Bonerate	Rjuni	0,6800	0,6457	0,3333	0,4667	0,6667	0,6667	0,5600	0,5930	Tertinggal	Tertinggal
60	Taka Bonerate	Latondu	0,6114	0,6057	0,3500	0,2833	0,6000	0,6	0,5205	0,4963	Tertinggal	Tertinggal
61	Taka Bonerate	Tarupa	0,6343	0,64	0,4167	0,4167	0,4667	0,4667	0,5059	0,5078	Tertinggal	Tertinggal

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
62	Taka Bonerate	Khusus Pasitallu	0,6114	0,5886	0,3167	0,3333	0,6667	0,6667	0,5316	0,5295	Tertinggal	Tertinggal
63	Pasilambena	Kalaotoa	0,4857	0,6171	0,3833	0,45	0,6667	0,6667	0,5119	0,5779	Tertinggal	Tertinggal
64	Pasilambena	Garaupa	0,6457	0,5657	0,4167	0,45	0,6667	0,5333	0,5763	0,5163	Tertinggal	Tertinggal
65	Pasilambena	lembang Matene	0,6743	0,6914	0,4167	0,35	0,7333	0,7333	0,6081	0,5916	Berkembang	Tertinggal
66	Pasilambena	Pulo Madu	0,5600	0,4114	0,2833	0,2167	0,6667	0,4667	0,5033	0,3649	Tertinggal	Sangat Tertinggal
67	Pasilambena	Karumpa	0,5600	0,56	0,3500	0,3167	0,6667	0,6667	0,5256	0,5144	Tertinggal	Tertinggal
68	Pasilambena	Garaupa Raya	0,5029	0,5371	0,2833	0,2167	0,6000	0,6667	0,4621	0,4735	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal
69	Pasimasunggu Timur	Bontobulaeng	0,5829	0,5771	0,7167	0,6833	0,6667	0,6	0,6554	0,6202	Berkembang	Berkembang
70	Pasimasunggu Timur	Bontobaru	0,6686	0,6857	0,5500	0,6	0,6667	0,6667	0,6284	0,6508	Berkembang	Berkembang
71	Pasimasunggu Timur	Bontomalling	0,6571	0,68	0,4500	0,3667	0,6667	0,6	0,5913	0,5489	Tertinggal	Tertinggal
72	Pasimasunggu Timur	Lembang Baji	0,6057	0,6057	0,4667	0,4	0,6667	0,6667	0,5797	0,5575	Tertinggal	Tertinggal
73	Pasimasunggu Timur	Bonto Jati	0,5829	0,6914	0,6167	0,6	0,6667	0,6	0,6221	0,6305	Berkembang	Berkembang
74	Pasimasunggu Timur	Ujung	0,6743	0,7257	0,5167	0,4333	0,6667	0,6667	0,6192	0,6086	Berkembang	Berkembang
75	Buki	Buki	0,6857	0,7086	0,5833	0,6667	0,6667	0,6667	0,6452	0,6806	Berkembang	Berkembang
76	Buki	lalang Bata	0,7029	0,6971	0,5333	0,6167	0,6667	0,6667	0,6343	0,6602	Berkembang	Berkembang
77	Buki	Balang Butung	0,6282	0,68	0,5500	0,5	0,6667	0,6667	0,6157	0,6156	Berkembang	Berkembang
78	Buki	Kohala	0,7943	0,7143	0,7500	0,5	0,3333	0,6667	0,6259	0,6270	Berkembang	Berkembang
79	Buki	Bontolempangan	0,7543	0,7371	0,6000	0,5333	0,6667	0,6667	0,6737	0,6457	Berkembang	Berkembang

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
80	Buki	Mekar Indah	0,7829	0,76	0,6500	0,5833	0,9333	0,9333	0,7887	0,7589	Maju	Maju
81	Buki	Buki Timur	0,6343	0,6514	0,5500	0,5833	0,6667	0,6	0,6170	0,6116	Berkembang	Berkembang

Sumber Data : Indeks Desa Membangun DISPMD Tahun 2020

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (2016-2021), dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas PMD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				100	100	100	100	100	76,19	81	85,7	90,5	90,5	76%	81%	86%	90%	90%
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	80%	80%	80%	80%	80%
4.	Persentase LSM aktif				75	75	75	75	75	69	70	55	42	45	92%	93%	73%	56%	60%
5.	Persentase LPM Berprestasi				90	90	90	90	90	85	90	100	100	100	94%	100%	111%	111%	111%
6.	Persentase PKK aktif				99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	101%	101%	101%	101%	101%
7.	Persentase Posyandu aktif				99	99	99	99	99	99,3	100	61,4	45,2	46,6	100%	101%	62%	46%	47%
8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat				77	78	79	80	81	26,03	30,4	39,5	40,7	42	34%	39%	50%	51%	52%
9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat									100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Dinas PMD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11.	Jumlah Desa Tertinggal				1	4	0	0	0	56	37	37	37	34					
12.	Jumlah Desa Mandiri				1	5	1	3	6	0	0	0	0	0					

Tabel 2.6 ini mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan rata-rata indikator yang ada sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah melebihi target yang telah ditentukan diantaranya yaitu : Persentase LPM Berprestasi dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 111%, Persentase PKK aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 101%, Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. Capaian ini didukung oleh peran aktif pemerintah desa serta masyarakat yang ada di desa dalam pencapaian indikator tersebut. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga aktif dalam melakukan pembinaan terhadap desa melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dukungan regulasi dari tingkat kabupaten. Sedangkan untuk indikator yang belum mencapai target adalah : Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2020 sebesar 90%, Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 yang hanya 80%, Persentase LSM aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 60%, persentase Posyandu aktif dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 47%, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dengan rasio capaian sampai dengan tahun 2020 yang hanya 52% . Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diperuntukkan bagi program dan kegiatan tersebut sehingga tidak semua program kegiatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh sesuai target. Tantangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang dihadapi untuk indikator yang belum tercapai tersebut secara teknis terkait koordinasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak berjalan secara optimal. Juga rendahnya koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan data lintas sector se Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja

tersebut di atas.

Berikut Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 2.7
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	75,00	79,17	83,33	87,50	87,50
2	Pasilambena	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
3	Pasimasunggu	71,43	76,19	80,95	85,71	85,71
4	Taka bonerate	74,07	77,78	81,48	85,19	85,19
5	Pasimasunggu Timur	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
6	Bontosikuyu	83,33	86,11	86,11	88,89	88,89
7	Bontoharu	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
8	Benteng	0	0	0	0	0
9	Bontomanai	76,67	80,00	83,33	86,67	86,67
10	Bontomatene	80,00	83,33	86,67	90,00	90,00
11	Buki	76,19	80,95	85,71	90,48	90,48
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik		76,19	80,95	85,71	90,48	90,48

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas, Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, dari tahun ke tahun meningkat, disemua wilayah kecamatan, dan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, cakupan tertinggi terdapat di kecamatan buki. Cakupan kabupaten pada awal periode RPJMD (Tahun 2016) sebesar 76,19%, dan pada Tahun ke-5 periode RPJMD (Tahun 2020) sebesar 90,48%. Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik yang diukur dalam hal ini adalah kepemilikan sarana dan prasarana kantor desa, kantor BPD sebagai kantor pemerintahan dan Baruga sayang (Balai Rujukan Keluarga dan Pusat Layanan Pembangunan) sebagai pusat aktivitas layanan masyarakat yang multi-fungsi dan pusat terbangunnya kembali tatanan kehidupan yang harmonis yang mengedepankan nilai-nilai dan norma lokal secara berkesinambungan.

Tabel 2.8
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7	Bontoharu	0	0	0	0	0
8	Benteng	7	7	7	7	7
9	Bontomanai	0	0	0	0	0
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	0	0	0	0
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		7	7	7	7	7

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 7 (tujuh) Kelurahan dan masing-masing kelurahan memiliki 1 (satu) kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM).

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten, terutama bagi 88 desa/kelurahan yang menjadi lokasi desa/kelurahan binaan secara berjenjang. Dari 88 desa/kelurahan atau 88 kelompok binaan PKK yang ada, persentase keaktifan sebesar 100 %. Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program program pembangunan daerah/pusat. Distribusi kelompok binaan PKK dan persentase PKK aktif berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	8	8	8	8	8
2	Pasilambena	6	6	6	6	6
3	Pasimasunggu	7	7	7	7	7
4	Taka bonerate	9	9	9	9	9
5	Pasimasunggu Timur	6	6	6	6	6
6	Bontosikuyu	12	12	12	12	12
7	Bontoharu	8	8	8	8	8
8	Benteng	3	3	3	3	3
9	Bontomanai	10	10	10	10	10
10	Bontomatene	12	12	12	12	12
11	Buki	7	7	7	7	7
Jumlah		88	88	88	88	88
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		8	8	8	8	8

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Tabel 2.10
Persentase PKK Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100	100	100	100	100
2	Pasilambena	100	100	100	100	100
3	Pasimasunggu	100	100	100	100	100
4	Taka bonerate	100	100	100	100	100
5	Pasimasunggu Timur	100	100	100	100	100
6	Bontosikuyu	100	100	100	100	100
7	Bontoharu	100	100	100	100	100
8	Benteng	100	100	100	100	100
9	Bontomanai	100	100	100	100	100
10	Bontomatene	100	100	100	100	100
11	Buki	100	100	100	100	100
Persentase PKK Aktif		100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Adapun jumlah LSM aktif dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Persentase LSM Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2	Pasilambena	0	0	0	0	0
3	Pasimasunggu	1	2	2	2	2
4	Taka bonerate	1	1	1	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7	Bontoharu	2	3	2	3	3
8	Benteng	74	73	55	41	43
9	Bontomanai	1	1	2	2	2
10	Bontomatene	2	2	2	0	1
11	Buki	0	0	0	1	1
Persentase LSM Aktif		69	70	55	42	45

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Posyandu merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia secara empirik telah dapat meratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di kabupaten Kepulauan selayar

pada lima tahun terakhir, persentase posyandu aktif berfluktuatif. Pada tahun 2016, persentase keaktifan sebesar 99,30 %, bahkan pada tahun 2017 sebesar 100%. Namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai pada 46,56%.

Tabel. 2.12
Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100,00	100,00	58,82	0,00	86,96
2	Pasilambena	100,00	100,00	35,29	84,62	0,00
3	Pasimasunggu	100,00	100,00	60,00	33,33	0,00
4	Taka bonerate	100,00	100,00	84,62	10,00	0,00
5	Pasimasunggu Timur	100,00	100,00	60,00	0,00	10,00
6	Bontosikuyu	100,00	100,00	45,83	51,35	45,83
7	Bontoharu	100,00	100,00	73,08	72,00	72,00
8	Benteng	95,45	100,00	41,67	40,74	40,74
9	Bontomanai	97,37	100,00	62,50	72,73	65,85
10	Bontomatene	100,00	100,00	58,82	62,50	82,35
11	Buki	100,00	100,00	100,00	0,00	63,64
Persentase Posyandu Aktif		99,30	100,00	61,36	45,21	46,56

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Tabel. 2.13
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KAYU BAUK		7		7		1		2		-		1
TANETE		12		6		1		4		-		1
MENARA INDAH		3		3		1		1		-		-
PAMATATA		3		3		1		3		-		-
MAHARAYYA		5		4		1		2		-		-
ONTO		8		4		1		3		-		1
BARAT LAMBONGANG		3		3		1		3		-		1
BONGAYYA		0		12		1		3		-		1
TAMALANREA		8		6		1		2		-		-
BONTONASALUK		7		7		1		6		-		-
BATANGMATA	16		8		1		2		1		1	
BATANGMATA SAPO	8		8		1		3		1		1	
BONTOLEMPANGAN		7		4		1		2		-		-
BUKI		10		5		1		2		-		1
KOHALA		12		7		1		4		-		-
LALANGBATA		0		8		1		5		-		-
BALANG BUTUNG		14		14		1		3		-		-
BUKI TIMUR		7		6		1		4		-		1
MEKAR INDAH		11		6		1		3		-		-

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
JAMBUIYA		0		3		1		3		-		1
BONEA MAKMUR		12		6		1		6		-		-
BARUGAIA		6		5		1		4		-		-
POLEBUNGING		13		9		1		4		-		-
BONEA TIMUR		0		10		1		3		-		1
MARE-MARE		2		7		1		3		-		1
KABURU		0		5		1		4		-		-
PARAK		0		7		1		4		-		-
BONTOKORAANG		5		5		1		4		-		1
BONTOMARANNU		6		10		1		4		-		1
BONTOSUNGGU		5		5		1		4		-		-
BONTOBORUSU		12		4		1		3		-		-
BONTOLEBANG		3		3		1		3		-		1
BONTOTANGGA		7		5		1		5		-		1
KAHU-KAHU		8		4		1		4		-		-
KALEPADANG		12		7		1		5		-		-
PUTABANGUN	10		8		1		4		-		1	-
BONTO BANGUN	19		9		1		5		1		-	-
LOWA		4		3		1		3		-		1
PATILERENG		10		4		1		3		-		
LAIYOLO BARU		4		4		1		4		-		1
BINANGA SOMBAYYA		8		4		1		4		-		1
LAIYOLO		6		6		1		5		-		-
PATIKARYA		4		4		1		4		-		1
LANTIBONGANG		10		8		1		4		-		1
APPATANA		3		3		1		3		-		1
HARAPAN		8		8		1		7		-		1
TAMBOLONGANG		10		5		1		5		-		1
POLASSI		3		3		1		3		-		-
KHUSUS BAHULUANG		2		2		1		2		-		1
RAJUNI		7		3		1		3		-		-
TAMBUNA		4		4		1		2		-		1
LATONDU		6		-		1		2		-		1
KAYUADI		3		-		1		5		-		-
TARUPA		6		6		1		2		-		-
NYIUR INDAH		3		4		1		3		-		-
JINATO		3		3		1		2		-		1
KHUSUS PASITALLU		2		2		1		1		-		-
BATANG		16		8		1		4		-		1
BONTOSAILE		4		4		1		3		-		-
MA'MINASA		3		3		1		3		-		-
MASSUNGKE		8		4		1		2		-		-
TANAMALALA		3		5		1		3		-		-
LABUANG PAMAJANG		8		4		1		2		-		1

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
TELUK KAMPE		6		3		1		3		-		1
KEMBANGRAGI		6		6		1		4		-		-
BONTOBULAENG		14		8		1		3		-		-
BONTOBARU		7		6		1		3		-		-
LEMBANG BAJI		5		5		1		4		-		1
BONTOMALLING		8		4		1		4		-		-
BONTOJATI		2		8		1		3		-		-
UJUNG		8		4		1		3		-		1
BONERATE		6		-		1		2		-		-
MAJAPAHIT		4		4		1		4		-		-
BATUBINKUNG		4		4		1		3		-		1
BONEA		3		3		1		2		-		-
LAMBEGO		0		6		1		2		-		-
KOMBA-KOMBA		6		3		1		1		-		-
SAMBALI		3		3		1		2		-		-
LAMANTU		0		0		1		1		-		1
KALAOtoa		0		8		1		2		-		-
GARAUPA		4		4		1		3		-		1
LEMBANGMATENE		4		4		1		2		-		-
PULAU MADU		10		7		1		3		-		-
KARUMPA		12		6		1		3		-		-
GARAUPA RAYA		3		3		1		2		-		1
BENTENG	37		17		1		7		1		1	
BENTENG UTARA	10		26		1		5		1		-	
BENTENG SELATAN	30		12		1		6		1		1	
Jumlah	130	471	88	403	7	81	32	258	6	0	5	35

Tabel. 2.14
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	33,33	35,80	37,04	38,27	39,51
2	Pasilambena	20,98	23,46	24,69	25,93	27,16
3	Pasimasunggu	19,75	22,22	23,46	24,69	25,93
4	Taka bonerate	23,46	25,93	27,16	28,40	29,63
5	Pasimasunggu Timur	23,45	27,16	28,40	29,63	30,86
6	Bontosikuyu	30,86	33,33	34,57	35,80	37,04
7	Bontoharu	32,09	34,57	35,80	37,04	38,27
8	Benteng	18,51	20,99	22,22	23,46	24,69
9	Bontomanai	35,80	38,27	39,51	40,74	41,98

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
10	Bontomatene	32,09	34,57	35,80	37,04	38,27
11	Buki	37,04	38,27	39,51	40,74	41,98
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat		26,03	30,42	39,51	40,74	41,98

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar selalu dilaksanakan 100% oleh masyarakat setempat atau lokasi program pemberdayaan yang dikoordinir oleh Kelompok Pemelihara. Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk Tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

Tabel. 2.15
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	100	100	100	100	100
2	Pasilambena	100	100	100	100	100
3	Pasimasunggu	100	100	100	100	100
4	Taka bonerate	100	100	100	100	100
5	Pasimasunggu Timur	100	100	100	100	100
6	Bontosikuyu	100	100	100	100	100
7	Bontoharu	100	100	100	100	100
8	Benteng	100	100	100	100	100
9	Bontomanai	100	100	100	100	100
10	Bontomatene	100	100	100	100	100
11	Buki	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat		100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2021

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2016 Persentase peningkatan LPM berprestasi sebesar 85 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 100 persen. Semakin meningkatnya LPM berprestasi diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Sementara presentase PKK berprestasi pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan pada tahun 2020 sebesar 100 persen. PKK yang berprestasi diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan lingkungan masyarakat.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2021

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 425.453.800	Rp 703.271.650	Rp 773.500.000	Rp 1.258.499.600	Rp 622.177.591	Rp 382.964.739	Rp 691.979.204	Rp 620.398.890	Rp 1.198.585.956	Rp 569.943.529	-0,04	-0,07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 47.530.000	Rp 241.900.000	Rp 448.500.000	Rp 486.000.000	Rp 151.200.000	Rp 42.367.400	Rp 235.955.749	Rp 417.988.032	Rp 456.600.180	Rp 138.812.890	-0,22	-0,24
3	Program peningkatan disiplin aparaturnya		Rp 15.000.000	Rp 60.000.000				Rp 15.000.000	Rp 59.500.000			0,44	0,44
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 28.000.000	Rp 30.000.000	Rp 81.900.000			Rp 26.000.000	Rp 26.448.500	Rp 71.102.700		0,43	0,41
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 70.000.000	Rp 63.567.000	Rp 14.725.000	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 60.237.750	Rp 54.781.250	Rp 13.753.000	-0,69	-0,64
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 472.296.200	Rp 514.300.600	Rp 275.000.000	Rp 164.655.750	Rp 32.125.500	Rp 455.398.900	Rp 449.363.800	Rp 269.243.540	Rp 157.267.300	Rp 32.125.500	-1,40	-1,32
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp 50.000.000	Rp 875.625.000	Rp 305.000.000	Rp 191.827.000	Rp 40.000.000	Rp 49.729.200	Rp 818.019.975	Rp 295.941.400	Rp 185.878.800	Rp 40.000.000	-1,33	-1,27
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp 122.000.000					Rp 121.654.200					0,00	
9	Program peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa/Kelurahan	Rp 877.050.000	Rp 513.220.000	Rp 2.540.000.000	Rp 4.409.536.861	Rp 181.071.890	Rp 851.119.770	Rp 488.906.773	Rp 2.483.293.096	Rp 4.217.141.416	Rp 180.012.540	-5,71	-5,49
10	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Rp 450.000.000		Rp 630.000.000	Rp 733.163.750	Rp 537.101.000	Rp 442.946.300		Rp 626.609.001	Rp 686.541.250	Rp 537.101.000	0,19	
11	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Rp 200.000.000	Rp 388.600.000	Rp 170.000.000	Rp 110.837.000	Rp 3.985.990	Rp 196.136.000	Rp 341.783.537	Rp 168.283.800	Rp 110.352.600	Rp 3.985.990	-7,04	-6,95

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
12	Program Pembangunan, Pengembangan Rehabilitasi Baruga Sayang	Rp 45.000.000					Rp 44.335.200						
13	Program pengembangan wilayah transmigrasi		Rp 150.082.750	Rp 180.000.000	Rp 208.849.000	Rp 5.438.000		Rp 99.688.580	Rp 171.481.273	Rp 131.519.000	Rp 1.550.120	-9,03	-20,68
	TOTAL	Rp 2.719.330.000	Rp 3.490.000.000	Rp 5.482.000.000	Rp 7.708.835.961	Rp 1.587.824.971	Rp 2.616.651.709	Rp 3.226.697.618	Rp 5.199.425.282	Rp 7.269.770.452	Rp 1.517.284.569	-220%	-358%

Pada Tabel 2.16 ini mengenai anggaran dan realisasi pelayanan perangkat daerah dapat dilihat bahwa pada bagian belanja langsung jika dibandingkan alokasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terbesar ada pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. Rp. 7.708.835.961,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.269.770.452,- atau sebesar 82% dan yang terkecil pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.587.824.971,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.517.284.569,- atau 73%. Realisasi terbesar dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi pada tahun 2018 sebesar 94%. Dari Tabel 2.13 di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh anggaran rata-rata dalam kisaran Rp. 4.197.598.186,- dengan persentase penyerapan anggaran sebesar rata-rata 85,6%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tantangan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1. Kapasitas lembaga pemerintahan desa belum sepenuhnya menjamin efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
2. Sumber daya manusia aparat pemerintah desa masih banyak yang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Pada umumnya pemerintah desa belum mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam yang tersedia.
4. Partisipasi masyarakat perdesaan dalam proses pembangunan relatif masih rendah.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu:

1. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat di pedesaan
2. Telah terbentuk berbagai Lembaga Kemasyarakatan di setiap

desa.

3. Tersedianya dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola oleh Kepala Desa.
4. Adanya Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa.
5. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
6. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan, beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif yaitu:

1. Pelayanan administrasi perkantoran belum terlaksana secara efektif;
2. Kapasitas masyarakat perdesaan pada umumnya relatif masih rendah;
3. Pada umumnya lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan belum dapat diberdayakan;
4. Lembaga ekonomi perdesaan belum berkembang secara signifikan;
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
6. Sistem pembangunan partisipatif belum melembaga;
7. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
8. Pada umumnya peran perempuan dalam pembangunan perdesaan belum memadai;
9. Jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga dalam rangka upaya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan belum memadai;
10. Akurasi data profil desa belum terlaksana dengan baik;
11. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
12. Kapasitas aparatur pemerintah desa pada umumnya relatif masih rendah;

13. Fungsi dan peran pemerintahan lokal belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan efisien.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, bahwa Visi pembangunan daerah adalah “***Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia***”, sedangkan Misi Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan

dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Dari Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka terdapat 4 program strategis yang terdiri dari 3 pilar pembangunan dan 1 program unggulan yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan 3 pilar gambaran kondisi yang diharapkan pada tahun 2026 yaitu :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”.

Dimana ketiga pilar ini dipengaruhi oleh kegiatan Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) yang menjadi program unggulan pemerintah dimana program ini memiliki dua dimensi yaitu :1) Peningkatan status desa berdasarkan IDM dan 2) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk dimensi Peningkatan status desa, target peningkatan status desa dalam periode RPJMD yakni sebesar 13 desa yang terdiri dari

3 desa maju (Desa Barugaia, Mekar Indah dan Patilereng), dan 10 Desa Mandiri (Desa Harapan, Bonerate, Buki, Kembang Ragi, Tanete, Bontosunggu, Polebunging, Bontobulaeng, Kalaotoa, dan Batang).

Dari dua dimensi ini, DisPMD berperan dalam Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang oleh DisPMD akan menitikberatkan pada pembinaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kepulauan Selayar yang saat ini berorientasi pada pengembangan desa wisata sebagai upaya mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta memfasilitasi bentuk-bentuk usaha yang dapat berkontribusi pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Berikut ini output dan Outcome dari Program unggulan Gerbang sari :

- Output
 - a. Teridentifikasinya BUMDesa yang aktif dan tidak aktif
 - b. Teridentifikasinya solusi dari masalah BUMDesa yang tidak aktif
 - c. Tersusunnya profil BUMDesa tahun 2021
 - d. Meningkatnya klasifikasi BUMDesa yang berperingkat dasar menjadi tumbuh dan seterusnya
- Outcome
 - a. Road map pembinaan BUMDesa yang didukung data dan profil BUMDesa di Kabupaten Kepulauan Selayar
 - b. BUMDesa aktif dapat berklasifikasi berkembang bahkan maju

Terkait Misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 dari 6 Misi utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, dengan fokus pada tujuan ke 2 yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan dengan Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan, indikator sasaran Indeks Desa Membangun. Indikator Indeks Desa Membangun terdapat beberapa variable dan indicator

yang mempengaruhi dalam penentuan indeks serta status desa sesuai IDM. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 sebagaimana berikut.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
No.	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan DISPMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan				
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Minimnya sarana dan prasarana Kantor 2. Minimnya dukungan stakeholder terkait	1. SDM Perangkat Desa yang masih minim 2. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan	Adanya regulasi dalam pembinaan administrasi desa
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Minimnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa 2. Minimnya pengetahuan perangkat desa tentang asset desa	1. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan 2. Kelancaran Komunikasi Internal dan lintas sektor	1. Regulasi yang mewajibkan agar dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 2. Tersedianya regulasi di tingkat lokal
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				
1.	Program Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).	1. Ketersediaan data primer di desa dalam profil desa 2. Konektivitas dengan desa yang tidak memiliki	1. Asumsi bahwa peningkatan status desa akan mengurangi potensi mendapatkan bantuan	1. Indikator penilaian peningkatan status desa menggunakan IDM 2. Apresiasi positif dari pemerintah

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
No.	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan DISPMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		jaringan komunikasi	2. Membangun koordinasi lintas sektor dan OPD terkendala pada penetapan lokasi/desa sasaran	pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan PDTT
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Minimnya pemahaman perangkat desa tentang pemahaman Pemberdayaan di Desa	Konflik kepentingan internal desa dalam pelaksanaan pemberdayaan	Tersedianya anggaran dana desa untuk melaksanakan program pemberdayaan
3.	Program Penataan Desa	Sosialisasi permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang penataan desa	Kurangnya kajian terhadap dampak positif dari proses penataan desa	1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1. Masih perlunya sosialisasi permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang tata cara kerjasama di Bidang pemerintahan desa 2. Perlunya pelatihan bagi kepala desa untuk lebih memahami pentingnya kerjasama antar desa	1. Kurangnya pemahaman bagi kepala desa tentang kerjasama antar desa 2. Kurangnya desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama antar desa	1. Kerjasama antar desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Mendukung pengembangan ekonomi unggulan kawasan pedesaan agar lebih produktif
5.	Program Pemberdayaan Lembaga	Sosialisasi penerapan Permendagri	1. Opersionalisasi LKD dan LAD belum menjadi	1. Terdapat regulasi pendukung

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
No.	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan DISPMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	No.18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD belum optimal	program prioritas dalam APBDesa 2. Keterbatasan SDM di desa dari sisi kualitas dan kuantitas	ditingkat pusat dan kabupaten 2. Masyarakat desa masih menghargai budaya dan kearifan lokal

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;

3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Berkembangnya status pembangunan desa
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan
9. Terentaskannya daerah tertinggal
10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementreian yang direvitalisasi
14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan
15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan governance, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan
16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian
17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan trasmigrasi serta inovasi, data dan informasi

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Visi : “ <i>Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia</i> ”				
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan DISPMD Kab. Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkembangnya status pembangunan desa	Minimnya anggaran dalam melaksanakan monitoring	Tidak lancarnya komunikasi dalam pencairan anggaran	Status Desa dimutakhirkan setiap tahun
2.	Menurunnya angka kemiskinan	Minimnya pemahaman desa dalam	Validitas data angka kemiskinan	Proses pemberdayaan dalam

Visi : “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan DISPMD Kab. Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		perencanaan yang efektif dan efisien		pembangunan yang menjadi prioritas nasional
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Sosialisasi urgensi BUMDesa belum merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualisasi regulasi belum maksimal 2. Membangun sinergitas antara pemerintah desa dan pengurus BUMDesa 3. Keterbatasan SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa dan potensi ekonomi di masing-masing desa 2. Ketersediaan pendanaan dari penyertaan modal
4.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada revitalisasi BUMDesa 2. Konektivitas antar stake holder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian dengan regulasi masih berproses ditingkat kabupaten 2. Mapping dan Pendataan potensi pembentukan BUMDesma 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan regulasi di tingkat pusat 2. Pemanfaatan potensi ekonomi yang heterogen
5.	Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi	Rendahnya kemampuan memfasilitasi pemerintah desa	Pembagian dan penetapan kewenangan terkendala oleh kemampuan SDM dan pemahaman akan regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi komoditas dan produk unggulan di masing-masing desa 2. Potensi pasar yang menjanjikan
6.	Terentaskannya daerah tertinggal	Masih ada Desa dengan ststus desa tertinggal	Koordinasi Lintas Sektor belum optimal	Permendes prioritas penyusunan dana desa mendukung
7.	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Tenaga kerja miskin belum sepenuhnya terserap dalam	Sarana dan prasarana kantor yang terbatas	Adanya program bantuan langsung tunai

Visi : “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”				
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Permasalahan Pelayanan DISPMD Kab. Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pelayanan di desa		
8.	Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Minimnya Pengetahuan perangkat desa dalam perencanaan desa	Koordinasi Lintas Sektor belum optimal	Permendes prioritas penyusunan dana desa mendukung
9.	Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan	Minimnya anggaran dalam melaksanakan pelatihan	SDM perangkat desa yang masih minim	Adanya regulasi dan kewajiban dalam peningkatan kapasitas SDM
10.	Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi	1. Minimnya Anggaran dalam koordinasi regulasi 2. Minimnya sarana dan prasarana kantor	Koordinasi lintas sektor yang belum optimal	Adanya permendagri dan permendes sebagai acuan dalam perumusan perkades

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat tujuan “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan” dengan sasaran “Meningkatnya status perkembangan Desa” yang dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, maka Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam menjawab Visi, Misi dan Program Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Mewujudkan peningkatan status perkembangan desa” dengan anggapan bahwa dengan meningkatnya status perkembangan desa dapat diasumsikan bahwa pencapaian tujuan 1 “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan” telah mengalami peningkatan. Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.
2. Pembinaan dan pengembangan kerjasama desa.
3. Pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
4. Pembinaan pembangunan sumberdaya alam dan usaha ekonomi desa.

Tabel 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Visi : “ <i>Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia</i> ”				
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan				
No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra DISMPD Provinsi Sul-Sel	Permasalahan Pelayanan DISPMD Kab. Kepulauan Selayar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya status perkembangan desa	Minimnya anggaran dalam melaksanakan monitoring	Tidak lancarnya komunikasi dalam pencairan anggaran	Status Desa dimutakhirkan setiap tahun

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah:

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan

iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;

- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan; Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1. meningkatkan pengembangan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
 - 2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;

3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
 4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
 5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
 7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan; Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:
1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana. Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan

penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah. Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;

2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan. Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan

3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 3. menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
 2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
 3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate; 2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
 2. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 3. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten. Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:
1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
 3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
 4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
 5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan

8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
- l. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah. Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
 1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
 2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
 3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yakni pada peran masyarakat dalam penetapan ruang setiap tahapan yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Percepatan pertambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi

lingkungan tentu akan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Lingkungan hidup adalah modal pembangunan, modal pembangunan itu harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alamnya tetap terjaga dengan baik. Tren seperti ini sulit karena yang banyak terjadi daerah-daerah dengan gampang membuka lahan pertanian untuk pembangunan aktifitas perdagangan dan jasa tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hal inilah yang menyebabkan sebagian keadaan Sumber daya Alam potensinya menurun.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (*provisioning*);
2. Jasa pengaturan (*regulating*);
3. Jasa budaya (*cultural*);
4. Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai

manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung ditumpangtindihkan (*overlay*) untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

3.4.2.1. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.

Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: pengembalaan intensif; Pgsd: pengembalaan sedang; Pgt: Pengembalaan terbatas.

Tabel 3.5. Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)						
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Pasimarannu	-	-	2.556,25	9.127,37	2.767,91	-	2.933,59
Pasilambena	-	-	1.948,97	4.703,97	-	3.257,85	353,12
Pasimasunggu	-	-	1.989,53	1.874,98	7.174,56	-	1.133,65
Pasimasunggu Timur	-	-	350,66	2.729,98	1.853,84	-	485,20
Takabonerate	-	-	1.095,88	1.051,37	-	424,57	3,21
Bontosikuyu	15,83	2.344,40	3.695,48	5.470,01	9.170,02	-	352,57
Bontoharu	950,54	1.639,94	2.357,57	2.869,57	4.894,55	-	78,30
Bontomanai	19,76	1.899,44	1.782,02	1.964,04	7.055,80	-	19,06
Benteng	-	158,91	192,45	126,50	17,83	-	-
Bontomatene	9.074,16	920,95	2.920,56	1.071,73	1.056,96	-	684,00
Buki	1.348,79	817,93	1.163,40	609,65	2.896,68	-	-
Total (Ha)	11.409,08	7.781,57	20.052,78	31.599,18	3.888,15	3.682,43	5,14
Total (%)	9,71	6,63	17,07	26,90	31,41	3,14	5,14

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebesar 31,41 % dari luasan Kabupaten Kepulauan Selayar, diikuti kelas lahan V sebesar 26,90 %, kelas lahan IV 17,07 %, kelas lahan II 9,71 %, kelas lahan III 6,63 %, kelas lahan VIII 5,14 % dan yang terakhir kelas lahan VII 3,14 %. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif.

3.4.2.2. Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan *system grid* skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Ketersediaan serta kebutuhan air di Kabupaten Kepulauan Selayar diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6. Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Air Bersih Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Volume Air Tahun 2019 (m ³ /tahun)		Selisih
	Ketersediaan	Kebutuhan	
Pasimarannu	14.803.091,00	402.149,00	14.400.924,20
Pasilambena	9.139.644,00	332.726,00	8.806.917,60
Pasimasunggu	11.178.884,00	373.248,00	10.805.636,00
Pasimasunggu Timur	5.563.514,00	331.376,00	5.232.083,00
Takabonerate	3.764.289,00	596.376,00	3.167.913,00
Bontosikuyu	18.305.814,00	659.621,00	17.646.193,20
Bontoharu	12.158.546,00	1.236.298,00	10.922.248,40
Bontomanai	10.314.005,00	655.560,00	9.658.445,00
Benteng	618.163,00	1.240.056,00	-621.893,00
Bontomatene	14.011.209,00	582.120,00	13.429.089,00
Buki	6.641.100,00	324.346,00	6.316.754,40
Total	106.498.259,00	6.733.930,00	99.764.329,40

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 106.498.259,00 m³/tahun, sementara kebutuhan air sebesar 6.733.930,00 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 99.764.329,40 m³/tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Bontosikuyu (17.646.193,20 m³/tahun), dan Pasimarannu (14.400.924,20m³/tahun). Hal ini dapat dipahami karena

Kecamatan Bontosikuyu dan Pasimarannu merupakan kecamatan yang memiliki vegetasi yang cukup baik dan masih memiliki kawasan hutan yang luas. Sementara itu, untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Benteng (-621.893,00 m³/tahun). Hal ini menjadi suatu informasi bahwa di Kecamatan Benteng perlu dilakukan pengelolaan air yang tepat mengingat bahwa di daerah tersebut merupakan Ibu Kota Kabupaten.

Tabel 3.7 Status Air Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Status Air Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Pasimarannu	17.327,73	99,67	57,40	0,33
Pasilambena	10.263,91	100,00	-	-
Pasimasunggu	12.072,72	99,18	100,00	0,82
Pasimasunggu Timur	5.305,63	97,90	114,05	2,10
Takabonerate	2.296,07	89,17	278,97	10,83
Bontosikuyu	21.048,31	100,00	-	-
Bontoharu	12.608,55	98,58	181,94	1,42
Bontomanai	12.738,78	99,99	1,33	0,01
Benteng	74,53	15,04	421,15	84,96
Bontomatene	15.728,35	100,00	-	-
Buki	6.836,45	100,00	-	-
Total	116.301,03	99,02	1.154,83	0,98

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa status air pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas 116.301,03 Ha atau sekitar 99,02 %, sedangkan Telah Melampaui Ambang Batas seluas 1.154,83 Ha atau sekitar 0,98 %. hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui diakibatkan kondisi/status tanah ataupun kemampuan lahan untuk menyimpan/menyerap volume air.

Tabel 3.8. Proyek Volume Air Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Proyeksi Volume Air (m ³ /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan 2019	Kebutuhan 2024
Pasimarannu	14.803.091,00	402.149,00	7.568.402,63
Pasilambena	9.139.644,00	332.726,00	6.501.044,62
Pasimasunggu	11.178.884,00	373.248,00	7.243.603,19
Pasimasunggu Timur	5.563.514,00	331.376,00	6.218.859,14
Takabonerate	3.764.289,00	596.376,00	11.598.163,96
Bontosikuyu	18.305.814,00	659.621,00	12.523.462,19
Bontoharu	12.158.546,00	1.236.298,00	23.685.467,77
Bontomanai	10.314.005,00	655.560,00	12.365.457,30
Benteng	618.163,00	1.240.056,00	25.115.147,81
Bontomatene	14.011.209,00	582.120,00	10.980.583,04
Buki	6.641.100,00	324.346,00	6.110.392,86
Grand Total	06.498.259,00	6.733.930,00	129.910.584,51

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa ketersediaan tidak tercukupi hingga tahun 2024. Namun jika diperhatikan data kebutuhan air di tahun 2019 mengalami peningkatan jika diproyeksikan ke tahun 2024 (selisih 5 tahun) sebesar 123.176.618,51 m³/tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Adapun hasil analisis ketersediaan air yang paling banyak terdapat di Kecamatan Pasimarannu dan Bontomatene, sedangkan yang paling sedikit ketersediaan airnya terdapat di Kecamatan Benteng. Selanjutnya, untuk kategori kebutuhan air yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Benteng dan Bontoharu.

3.4.2.3. Analisis Daya Dukung Ketersediaan Pangan

Dalam pemanfaatan ruang, kawasan yang menjadi perhatian adalah kawasan budidaya yakni kawasan pertanian terutama yang berkaitan dengan pangan, mengingat pangan menjadi salah satu komoditas utama penunjang hidup manusia. Hal ini disebabkan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan adalah pangan. Untuk pemenuhan akan ketersediaan pangan perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang menjadi faktor untuk memproduksi pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan *Food and Agriculture Organization* (1996) bahwa ketersediaan pangan menjadi salah satu

faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penyediaan lahan untuk pangan adalah penurunan luas lahan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi. Adapun data hasil analisis terkait ketersediaan, kebutuhan dan selisih volume pangan tahun 2019 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.9 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyedia Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Volume Pangan Tahun 2019 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Pasimarannu	6.942	7.305	-363,00
Pasilambena	4.286	6.044	-1.757,90
Pasimasunggu	5.243	6.780	-1.537,65
Pasimasunggu Timur	2.609	6.021	-3.411,47
Takabonerate	1.765	10.833	-9.068,13
Bontosikuyu	8.585	11.982	-3.397,41
Bontoharu	5.702	22.458	-16.755,94
Bontomanai	4.837	11.909	-7.071,59
Benteng	290	22.526	-22.236,35
Bontomatene	6.571	10.575	-7.071,59
Buki	3.114	5.892	-2.777,41
Grand Total	49.945	122.325	-72.380,49

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Hasil analisis ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 49.945 kkal/tahun, sedangkan kebutuhan pangan berjumlah 122.325 kkal/tahun. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan yang telah melampaui ketersediaan terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar (-72.380,49 kkal/tahun). Hal ini dikarenakan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kepadatan penduduk yang cukup besar sehingga kebutuhan pangan juga akan besar, sementara produksi

Tabel 3.10. Status Pangan Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Status Air Tahun 2019 (Ha)			
	Belum Melampaui Ambang Batas		Telah Melampaui Ambang Batas	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Pasimarannu	16.658,21	95,82	726,91	4,18
Pasilambena	9.057,81	88,25	1.206,10	11,75
Pasimasunggu	10.828,90	88,96	1.343,82	11,04
Pasimasunggu Timur	4.284,49	79,05	1.135,20	20,95
Takabonerate	1.836,25	71,31	738,79	28,69
Bontosikuyu	17.272,32	82,06	3.776,00	17,94
Bontoharu	9.407,14	73,55	3.383,35	26,45
Bontomanai	8.237,75	64,66	4.502,36	35,34
Benteng	38,30	7,73	457,39	92,27
Bontomatene	12.312,92	78,28	3.415,43	21,72
Buki	3.437,61	50,28	3.398,84	49,72
Total	93.371,68	79,50	24.084,18	20,50

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Berdasarkan dari data diatas, dapat dijelaskan bahwa status pangan pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas 93.371,68 Ha atau sekitar 79,50 %, sedangkan Telah Melampaui Ambang Batas seluas 24.084,18 Ha atau sekitar 20,50 %. hal ini berarti ketersediaan pangan dan kebutuhan penyediaan pangan masih mencukupi dari keseluruhan jumlah masyarakat yang ada.

Tabel 3.11. Proyeksi Volume Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Proyeksi Volume Pangan (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan 2019	Kebutuhan 2024
Pasimarannu	6.942	7.305	10.877
Pasilambena	4.286	6.044	9.343
Pasimasunggu	5.243	6.780	10.410
Pasimasunggu Timur	2.609	6.021	8.937
Takabonerate	1.765	10.833	16.668
Bontosikuyu	8.585	11.982	17.998
Bontoharu	5.702	22.458	34.040
Bontomanai	4.837	11.909	17.771
Benteng	290	22.526	36.095
Bontomatene	6.571	10.575	15.781
Buki	3.114	5.892	8.781
Grand Total	49.945	122.325	186.705

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kepulauan Selayar, 2021-2026

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2024 tidak mencukupi ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat. Penggunaan pangan di setiap kecamatan terlihat tidak cukup baik diperkirakan kebutuhan pangan sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya hingga tahun 2024 yang masih terhitung tidak seimbang.

Untuk kebutuhan dan ketersediaan pangan hingga tahun 2024 selisih terbesar terlihat pada Kecamatan Benteng (35.805 kkal/tahun), sedangkan untuk selisih terkecil terlihat pada Kecamatan Bontosikuyu (9.413 kkal/tahun). Besarnya kebutuhan pangan pada kecamatan tersebut didorong oleh pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut yang sangat besar namun produksi pangannya masih kecil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa permasalahan dan isu-isu yang sangat mendasar sebagai pijakan dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan kurun waktu lima tahun yang akan datang. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa isu-isu pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman aparaturnya desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa yang masih terbatas;
2. Keberdayaan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa) yang belum maksimal;
3. Belum optimalnya fungsi pemerintahan desa, kerja sama desa, kelembagaan masyarakat dan kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya keberdayaan ekonomi desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan;
4. Penggunaan dan Pemanfaatan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
5. Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup tinggi sebesar 37 Desa (3 Desa Sangat Tertinggal dan 34 Desa Tertinggal);
6. Sarana dan prasarana di pedesaan yang belum merata;
7. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang cukup rendah;
8. Optimalisasi pembinaan PKK dan Kader PKK (kurangnya kinerja Kader PKK)
9. Tingkat Kunjungan masyarakat ke Posyandu yang belum maksimal;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dalam hal ini Tujuan Perangkat daerah berpedoman pada visi dan misi pemerintah kabupaten yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun ke depan memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi terkait dengan visi, misi dan program pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yaitu “**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**” maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar bertekad untuk mendukung visi tersebut melalui misi ” **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan** ”(Misi : 2) dengan penjabaran tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut :

4.1. Tujuan

Bedasarkan hasil telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021-2026 maka rumusan Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan misi ke-2 “**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**“ adalah “**Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan di Kabupaten Kepulauan Selayar**”.

Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan di Kabupaten Kepulauan Selayar”**, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sasaran “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan” dengan indikator sasaran “Indeks Desa Membangun” sebagai dasar untuk mencapai tujuan dengan melihat hasil telaah kesesuaian Visi, Misi dan Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD), Renstra Kementerian Desa PDT.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu : 1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan; 2 Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai Sakip OPD	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik)	0,7719	0,7788	0,7858	0,7929	0,8000
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Peningkatan status Desa	6,17%	6,17%	4,93%	4,93%	4,93%
			Persentase Pengentasan Desa sangat Tertinggal	1,23%	1,23%	1,23%	0	0
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	1,23%	0	1,23%	1,23%
			Persentase Peningkatan Status Desa Berkembang	1,23%	1,23%	0	1,23%	0
			Persentase Peningkatan Status Desa Maju	1,23%	0	1,23%	0	1,23%
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%

Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan		Persentase Desa yang meningkat statusnya	6,17 %	12,34 %	12,34 %	12,34 %	12,34 %
		Meningkatnya Status Perkembangan Desa	Persentase Desa berstatus sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
			Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	14,81	11,1 %	7,4 %	3,7 %	0 %
			Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	54,3 %	56,7 %	58 %	59 %	60,5 %
			Persentase Desa berstatus Desa Maju	27,2 %	27,2 %	27,2 %	27,2 %	27,2 %
			Persentase Desa berstatus Mandiri	3,7%	4,9 %	7,4%	9,8%	12,3%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C	CC	B	B	BB
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	B	BB	BB
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	75,4	76,61	77,8	79,9	81,1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku organisasi perangkat daerah yang membina desa dalam kegiatan Gerakan

Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) yang menjadi program unggulan pemerintah bertindak sebagai koordinator yang akan menghimpun semua sumber daya dari OPD yang mempunyai keterkaitan dengan desa. Gerbang Sari yang menjadi penopang utama 3 pilar pembangunan Bandar Maritim yaitu : KEK, KIPT dan PDL memiliki dua dimensi yaitu :1) Peningkatan status desa berdasarkan IDM dan 2) Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana dari dua dimensi ini, DisPMD berperan dalam Dimensi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa yang oleh DisPMD akan menitikberatkan pada pembinaan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ada di Kepulauan Selayar yang saat ini berorientasi pada pengembangan desa wisata sebagai upaya mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta memfasilitasi bentuk-bentuk usaha yang dapat berkontribusi pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini DisPMD selain bertugas selaku koordinator tetap mempunyai kewajiban mengintegrasikan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra DISPMD dan Renstra OPD lain yang bertanggungjawab secara teknis dalam tujuan pencapaian Gerbang Sari. Berikut bentuk intervensi program kegiatan pada setiap OPD teknis terkait Gerbang sari berdasarkan target peningkatan status desa :

Tabel 4.3
Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggung Jawab Gerbang Sari sesuai target Peningkatan Status Desa Mandiri
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2026

No	Desa Target Mandiri	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
1	Barugaia	0,771	Maju	1	0,8156	Penambahan min. 8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,7674
						Pembangunan/pengadaan 2 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8341
2	Mekar Indah	0,7589	Maju	2	0,8156	Penambahan Nakes min.3 orang (selain dokter dan bidan)	IKS	Dinas Kesehatan	0,7626
						Pembangunan ruang publik di Desa	IKS		0,7703
						Penambahan min.2 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,7722
						Pemasangan internet di kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,7798
						Pembangunan TPS dan TPA sampah	IKS	Dinas LH	0,7817
						Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga >75%	IKS	Dinas Kesehatan	0,7836
						Pembangunan jamban sendiri/KK	IKS	Dinas Tarkim	0,7931
						Pembangunan min.4 lapangan olahraga	IKS	Disdikpora	0,7969
						Pembangunan/pengadaan 1 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8192
3	Patilereng	0,7359	Maju	3	0,8156	Penambahan min.6 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,7434
						Fasilitasi/Pembinaan Kader Posyandu	IKS	Dinas Kesehatan	0,7492

No	Desa Target Mandiri	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
						Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga >75%	IKS	Dinas Kesehatan	0,753
						Pembangunan min.2 lapangan olahraga	IKS	Disdikpora	0,7549
						Pengadaan Nakes min.5 orang (selain Dokter & Bidan)	IKS	Dinas Kesehatan	0,7644
						Fasilitasi upaya penguatan sinyal telepon	IKS	Dinas Infokom	0,7682
						Pembangunan 1 unit penginapan	IKE	Dinas Pariwisata	0,7793
						Pembangunan/pengadaan 2 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8238

Tabel 4.4

Bentuk Intervensi/Kegiatan OPD Penanggung Jawab Gerbang Sari sesuai target Peningkatan Status Desa Maju Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No	Desa Target Maju	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
1	Harapan	0,7033	Berkembang	4	0,7072	Fasilitasi Pembinaan Kader Posyandu	IKS	Dinas Kesehatan	0,7109
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,822
2	Bonerate	0,6908	Berkembang	5	0,7072	Pemasangan Internet Kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,6984

No	Desa Target Maju	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,8095
3	Buki	0,6806	Berkembang	9	0,7072	Penambahan min.6 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6863
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7974
4	Kembangragi	0,6732	Berkembang	11	0,7072	Penambahan min.2 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,675
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7861
5	Tanete	0,6584	Berkembang	15	0,7072	Penambahan min.6 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6641
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7752
6	Bontosunggu	0,6516	Berkembang	17	0,7072	Penambahan min.8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6592
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7703
7	Polebunging	0,6443	Berkembang	24	0,7072	Penambahan min.8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6519
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,763
8	Bontobulaeng	0,6202	Berkembang	34	0,7072	Penambahan min.8 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,6277

No	Desa Target Maju	Kondisi 2020			Target	Bentuk Intervensi/ Kegiatan	Indeks	OPD Penanggung Jawab	Total Poin
		Poin	Status	Peringkat					
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7388
9	Kalaotoa	0,5779	Tertinggal	57	0,7072	Penambahan min.4 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,5817
						Pemasangan Internet Kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,5893
						Perbaikan/peningkatan kualitas jalan desa	IKE	Dinas PUPR	0,6004
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7115
10	Batang	0,5675	Tertinggal	63	0,7072	Penambahan min.2 kelompok olahraga	IKS	Disdikpora	0,5693
						Pemasangan Internet Kantor Desa	IKS	Dinas Infokom	0,5769
						Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan desa untuk dilalui kendaraan roda 4	IKE	Dinas PUPR	0,5992
						Pembangunan/pengadaan 3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah	IKL	BPPD	0,7103

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana yang akan mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang tertuang dalam RPJMD melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan dinamisnya sektor pemberdayaan masyarakat dan desa.

Strategi adalah langkah –langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran suatu organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dikonkritkan dengan arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu startegis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahapa sebagai penjabaran dari strategi.

Berikut ini adalah identifikasi dan pemetaan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta strategi alternatif menggunakan Analisis SWOT :

1. Faktor Internal (IFAS)

a. Kekuatan (Strength), diantaranya meliputi :

- ✓ Terdapat 81 desa
- ✓ Alokasi Dana Desa 12% dari total APBD
- ✓ Tersedianya regulasi pendukung ditingkat kabupaten
- ✓ DisPMD menjadi pusat informasi OPD terkait desa
- ✓ Kuatnya posisi kelembagaan DisPMD

b. Kelemahan (Weakness)

- ✓ Kapasitas SDM di OPD dan Aparat Desa belum memadai
- ✓ Sarana dan prasarana kerja OPD terbatas

- ✓ Data lambat ter-up date
- ✓ Kekuatan jaringan telepon/seluler tidak merata di semua desa

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- ✓ Keberadaan Dana Desa
- ✓ Dukungan dan dinamisnya regulasi Kemendagri dan Kemendes
- ✓ Pembangunan desa berbasis potensi ekonomi lokal menjadi prioritas pembangunan nasional
- ✓ Mayoritas penduduk menetap di pedesaan

b. Ancaman

- ✓ Kondisi geografis wilayah
- ✓ Dominasi dan intervensi pihak luar
- ✓ Sarana dan prasarana pemerintahan desa belum memadai
- ✓ Melemahnya nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat

Tabel 5.1.
Analisis SWOT Pengembangan Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH (S) (Kekuatan)	WEAKNESS (W) (Kelemahan)
OPPORTUNITY(O) (Peluang)	Strategi/S-O 1. Mendorong peningkatan efektifitas penggunaan APBDesa 2. Dukungan alokasi anggaran berdasarkan regulasi pemerintah pusat dan ditingkat kabupaten 3. Mempercepat akselerasi pengembangan desa digital	Strategi/W-O 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah dan aparat desa 2. Membangun sinergitas dengan OPD terkait menuju konsep "One Data" 3. Membangun perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDesa
TREATH (T) (Ancaman)	Strategi/S-T	Strategi/W-T

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH (S) (Kekuatan)	WEAKNESS (W) (Kelemahan)
	1. Meng-eksplere bargaining position DisPMD dengan 'desa'-nya ke stake holder 2. Pelibatan DisPMD dan pemerintah desa dalam program dan kegiatan OPD terkait	1. Revisi dan sinkronisasi regulasi ditingkat kabupaten dengan Kemendagri dan Kemendesa PDTT 2. Pengembangan sistem informasi on line

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada table 5.2.

**Tabel 5.2. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi yang baik 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan 3. Mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan dan tata Kelola pemerintahan desa serta pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat	- Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa dan optimalnya pengelolaan keuangan desa

Visi : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Perangkat Daerah sesuai SAP	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dukungan regulasi dan anggaran bagi peningkatan SDM serta pengalih fungsian Aset, fasilitas dan sarana perekonomian
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perdesaan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDesa 3. Memfasilitasi BUMDesa dalam menyusun proposal usaha 4. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa 5. Memberikan ruang yang cukup kepada BUMDesa untuk eksis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Regulasi terkait peran dan Desa dalam mendukung keberdayaan (keaktifan) BUMDesa dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa dan berkontribusi terhadap Padesa 2. Memfasilitasi BUMDesa untuk bermitra dengan lembaga keuangan dan badan usaha lainnya 3. Mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan potensi masyarakat desa melalui LKD dan LAD 2. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi ditingkat kabupaten yang mengkomodir pembinaan LKD dan LAD 2. Menintegrasikan kegiatan pembinaan LKD dan LAD mulai dari tingkat pusat/nasional

Visi : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. Menyerap aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat melalui tokoh masyarakat yang menjadi pengurus LKD dan LAD	sampai tingkat desa
		1. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	2. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 3. Pengawasan sistem keuangan dan pelaporan keuangan desa
		1. Memfasilitasi desa dalam hal penataan desa	Memfasilitasi desa untuk penyelenggaraan penataan desa
		1. Memfasilitasi desa dalam membuat perjanjian kerjasama antardesa dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 2. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama dengan pihak ketiga	1. Mendorong desa untuk melakukan kerjasama antar desa 2. Memfasilitasi desa untuk bermitra dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kerjasama

**Tabel 5.3. (T-C.26)
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : <i>“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”</i>			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perdesaan	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Optimalisasi peran dan fungsi BUMDesa 3. Memfasilitasi BUMDesa dalam menyusun proposal usaha 4. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa 5. Memberikan ruang yang cukup kepada BUMDesa untuk eksis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa 6. Memberdayakan potensi masyarakat desa melalui LKD dan LAD 7. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa 8. Menyerap aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat melalui tokoh masyarakat yang menjadi pengurus LKD dan LAD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Regulasi terkait peran dan Desa dalam mendukung keberdayaan (keaktifan) BUMDesa dalam peningkatan pendapatan masyarakat desa dan berkontribusi terhadap Padesa 2. Memfasilitasi BUMDesa untuk bermitra dengan lembaga keuangan dan badan usaha lainnya 3. Mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa 3. Menyusun regulasi ditingkat kabupaten yang mengkomodir pembinaan LKD dan LAD 4. Menintegrasikan kegiatan pembinaan LKD dan LAD mulai dari tingkat pusat/nasional sampai tingkat desa

Visi : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang berorientasi hasil 2. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi yang baik 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perdesaan 4. Mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan dan tata Kelola pemerintahan desa serta pelayanan public untuk kesejahteraan Masyarakat 5. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Peningkatan Disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 3. Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa dan optimalnya pengelolaan keuangan desa 4. Dukungan regulasi dan anggaran bagi peningkatan SDM serta pengalih fungsian Aset, fasilitas dan sarana perekonomian

Visi : “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”			
Misi 2 : “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Memfasilitasi desa dalam hal penataan desa 3. Memfasilitasi desa dalam membuat perjanjian kerjasama antardesa dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 4. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kerjasama antardesa dan kerjasama dengan pihak ketiga 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 6. Pengawasan sistem keuangan dan pelaporan keuangan desa 7. Memfasilitasi desa untuk penyelenggaraan penataan desa 8. Mendorong desa untuk melakukan kerjasama antar desa 9. Memfasilitasi desa untuk bermitra dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kerjasama

Kontribusi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang Visi Bandar Maritim

3 Program Prioritas tersebut adalah :

- 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
- 2) Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)
- 3) Pembangunan Pusat Distribusi Logistik

Program pendukung 3 pilar tersebut adalah Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANG SARI) dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Selayar berperan sebagai leading sektornya. Tabel 5.2. tertang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan akan menunjukkan kontribusi aktif DisPMD dalam pelaksanaan tiga pilar tersebut, yaitu :

- 1) Peran strategis DisPMD dalam KEK Pariwisata adalah (1) bersama Disparbud mendorong terbentuknya desa wisata dengan beragam

destinasi, (2) Destinasi wisata akan dikelola BUMDesa dengan memberdayakan aset desa, (3) Desa-desa bertetangga yang memiliki potensi wisata diaahkan untuk membantu BUMDesa bersama (BUMDesma), (4) Desa wisata akan difasilitasi untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berinvestasi mengembangkan potensi dan destinasi wisatanya. (5) Memaksimalkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk bersama-sama Pokdarwis menjaga dan melestarikan destinasi wisata, dan (6) APBDesa akan selalu mendukung pelaksanaan desa wisata.

- 2) Kontribusi DisPMD dalam KIPT adalah (1) bersama Disper membina desa nelayan dengan terlebih dahulu memetakan potensi perikanan dan pasar pasca produksi yang akan dikelola oleh BUMDesa (2) Memfasilitasi desa nelayan yang termasuk dalam sub sentra untuk mengalokasikan anggaran dalam APBDesa dengan memberikan penyertaan modal bagi BUMDesa yang mempunyai unit usaha pengelolaan hasil laut atau pasca produksi, (3) mendukung peran Disperindag KUKM membina UMKM/ industri rumahan yang menghasilkan pengembangan produk hasil laut dengan mengarahkannya bermitra dengan BUMDesa dalam hal permodalan dan pemasaran produk.
- 3) Pusat Distribusi Logistik (PDL) akan mendorong : (1) desa yang masuk dalam kawasan kepelabuhanan untuk berkontribusi dalam pembebasan lahan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting perluasan pelabuhan, (2) DisPMD akan mempercepat akselerasi desa digital sebagai upaya membangun komunikasi pasar untuk produk dan daerah tertentu yang berasal dari luar pulau Sulawesi seperti Surabaya, dan (3) menginventarisasi BUMDesa yang berpotensi mendatangkan barang/komoditas tertentu dalam jumlah besar dengan memanfaatkan sarana peti kemas/kontainer begitu pula sebaliknya.

GERBANG SARI sebagai penopang utama 3 pilar tersebut akan berlandaskan kearifan lokal dimana DisPMD memperjuangkan dua dimensi dari program tersebut yaitu : (1) dimensi peningkatan status dan (2) pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Sasaran khusus program sari terdiri dari 13 desa dan 81 desa pada umumnya. 13 (tigabelsa) desa dimaksud yaitu 1) Barugaia 2) Mekar Indah 3) Patilereng 4) Harapan 5) Bonerate 6) Buki 7) Kembang Ragi 8) Tanete 9) Bontosunggu 10) Polebunging 11) Bontobulaeng 12) Kalaotoa 13) Batang. Gambaran umum kegiatan program Gerbang Sari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Deskripsi Kegiatan Terkait Dimensi GERBANG SARI

NO	DISKRIPSI KEGIATAN	
	DIMENSI PENINGKATAN STATUS DESA	DIMENSI PEMBANGUNAN EKONOMI
01.	Menganalisis capaian IDM setiap tahun	Menganalisis IDM dan menitik beratkan pada IKE
02.	Menentukan desa sasaran dan desa binaan	Mengkorelasikan desa sasaran untuk peningkatan status dan pembangunan ekonomi
03.	Menentukan intervensi kegiatan dan OPD penanggung jawab untuk peningkatan status desa	Menentukan intervensi kegiatan dan OPD penanggung jawab
04.	Mengestimasi jumlah desa yang dapat dinaikkan statusnya setiap tahun	Menentukan desa wisata, desa nelayan, desa pertanian dan desa UMKM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat

Rencana proram, kegiatan dan sub kegiatan, indicator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten kepulauan Selayar selama Periode 2022 sampai 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02:13	urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5.357.393.000		5.430.735.710		5.566.667.025		5.700.211.368		5.836.218.411		5.836.218.411		
Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Daerah	01	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	CC	CC	3.567.393.000	B	3.616.230.610	B	3.706.744.862	BB	3.795.669.672	BB	3.886.234.350	BB	3.886.234.350		
		01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERSEDINYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8 Dok	8 Dok	15.000.000	8 Dok	17.250.000	8 Dok	19.837.500	8 Dok	22.813.125	8 Dok	26.235.097	8 Dok	26.235.097		
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah DIS.PMD	1 Dok	1 Dok	3.000.000	1 Dok	3.450.000	1 Dok	3.967.500	1 Dok	4.562.625	1 Dok	5.247.019	1 Dok	5.247.019	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan DIS.PMD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	1 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA DIS.PMD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	1 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD DIS.PMD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	1 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan DIS.PMD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	1 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 Dok	2 Dok	2.000.000	2 Dok	2.300.000	2 Dok	2.645.000	2 Dok	3.041.750	2 Dok	3.498.013	2 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	2 Dok	2 Dok	2.000.000	2 Dok	2.300.000	2 Dok	2.645.000	2 Dok	3.041.750	2 Dok	3.498.013	2 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Aparatur Daerah	100%	100%	3.069.984.000	100%	3.044.210.260	100%	3.048.921.459	100%	3.039.172.759	100%	3.016.262.894	100%	3.016.262.894		

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji PTT dan tunjangan ASN	12 bln	12 bln	3.059.984.000	12 bln	3.032.710.260	12 bln	3.035.696.459	12 bln	3.023.964.009	12 bln	2.998.772.831	12 bln	2.998.772.831	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	12 bln	3.000.000	12 bln	3.450.000	12 bln	3.967.500	12 bln	4.562.625	12 bln	5.247.019	12 bln	5.247.019	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Tersusunnya RFK dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.750.000	1 Dok	6.612.500	1 Dok	7.604.375	1 Dok	8.745.031	1 Dok	8.745.031	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.02.07	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Laporan Hasil Tindak Lanjut LHP	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	1 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.03.01	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Tata kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100%	100%	2.000.000	100%	2.300.000	100%	2.645.000	100%	3.041.750	100%	3.498.013	100%	3.498.013		
		01.2.03.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.03.03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.03.04	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.03.05	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.03.06	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	1 Dok	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.300.000	1 Dok	2.645.000	1 Dok	3.041.750	1 Dok	3.498.013	1 Dok	3.498.013	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.03.07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.04	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH				0		0		0		0		0		0		
		01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.04.05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.05.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Aparatur Daerah			20.000.000		23.000.000		26.450.000		30.417.500		34.980.126		34.980.126		
		01.2.05.01	Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin pegawai	Jumlah WaktuPenyediaan sarana dan Prasarana disiplin pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.05	Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersediaanya Informasi/data terkait Kinerja pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia ASN	-	4 Orang	10.000.000	4 Orang	11.500.000	4 Orang	13.225.000	4 Orang	15.208.750	4 Orang	17.490.063	4 Orang	17.490.063	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kapasitas ASN terkait Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	4 Orang	10.000.000	4 Orang	11.500.000	4 Orang	13.225.000	4 Orang	15.208.750	4 Orang	17.490.063	4 Orang	17.490.063	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.06.01	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			305.409.000		351.220.350		403.903.403		464.488.913		534.162.250		534.162.250		
		01.2.06.02	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor		1 Paket	15.000.000	1 Paket	17.250.000	1 Paket	19.837.500	1 Paket	22.813.125	1 Paket	26.235.094	1 Paket	26.235.094	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan/Material		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.750.000	12 Bulan	6.612.500	12 Bulan	7.604.375	12 Bulan	8.745.031	12 Bulan	8.745.031	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perundang-Undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
		01.2.06.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan layanan administrasi perkantoran	47.909.000	12 Bulan	47.909.000	12 Bulan	55.095.350	12 Bulan	63.359.653	12 Bulan	72.863.600	12 Bulan	83.793.140	12 Bulan	83.793.140	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.06.-7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya barang peralatan rumah tangga	7.500.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	8.625.000	12 Bulan	9.918.750	12 Bulan	11.406.563	12 Bulan	13.117.547	12 Bulan	13.117.547	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.06.-8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	8.050.000	12 Bulan	9.257.500	12 Bulan	10.646.125	12 Bulan	12.243.044	12 Bulan	12.243.044	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.06.09	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu kunjungan tamu yang terfasilitasi	7.000.000	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	8.050.000	12 Bulan	9.257.500	12 Bulan	10.646.125	12 Bulan	12.243.044	12 Bulan	12.243.044	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	216.000.000	12 Bulan	216.000.000	12 Bulan	248.400.000	12 Bulan	285.660.000	12 Bulan	328.509.000	12 Bulan	377.785.350	12 Bulan	377.785.350	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.06.11	Panatausahaan Arsip dinamis Pada SKPD	Tersedia dan terpeliharanya Arsip DIS.PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.06.12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparatur dan ketersediaan Sarana			40.000.000		46.000.000		52.900.000		60.835.000		69.960.251		69.960.251		

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			URUSAN PEMERINTAHAN	dan Prasarana Gedung Kantor															
		01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda Dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meja rapat	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	17.250.000	1 Paket	19.837.500	1 Paket	22.813.125	1 Paket	26.235.094	1 Paket	26.235.094	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terbangunnya Parkiran Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit pengadaan sarana/prasarana (AC)Gedung Kantor	18.000.000	3 unit ac	18.000.000	3 unit ac	20.700.000	3 unit ac	23.805.000	3 unit ac	27.375.750	3 unit ac	31.482.113	3 unit ac	31.482.113	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor (Laptop)	7.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	8.050.000	1 Unit	9.257.500	1 Unit	10.646.125	1 Unit	12.243.044	1 Unit	12.243.044	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			65.000.000		74.750.000		85.962.500		98.856.875		113.685.406		113.685.406		
		01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	74.750.000	12 bulan	85.962.500	12 bulan	98.856.875	12 bulan	113.685.406	12 bulan	113.685.406	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Pelaksanaan Layanan Jasa Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik			50.000.000		57.500.000		66.125.000		76.043.750		87.450.313		87.450.313		
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 unit	25.000.000	1 unit	28.750.000	1 unit	33.062.500	1 unit	38.021.875	1 unit	43.725.156	1 unit	43.725.156	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	16 Unit	16 unit	15.000.000	16 unit	17.250.000	16 unit	19.837.500	16 unit	22.813.125	16 unit	26.235.094	16 unit	26.235.094	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	7 ac, 4 komputer, 4 printer	7 ac, 4 komputer, 4 printer	10.000.000	7 ac, 4 komputer, 4 printer	11.500.000	7 ac, 4 komputer, 4 printer	13.225.000	7 ac, 4 komputer, 4 printer	15.208.750	7 ac, 4 komputer, 4 printer	17.490.063	7 ac, 4 komputer, 4 printer	17.490.063	Dinas PMD	Kep. Selayar
		01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya/Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		01.2.09.11	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel yang terpelihara															-	-
		01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD				0		0		0	-	0		0		0			
		01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Peralatan BLUD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.13.05.	II. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat	Cakupan Lembaga Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya		33,33%	810.000.000	33,33%	821.088.900	33,33%	841.640.755	33,33%	861.831.717	33,33%	882.395.022	33,33%	882.395.022			

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TK.Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan taraf hidup Masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan			810.000.000		821.088.900		841.640.755		861.831.717		882.395.022		882.395.022		
		2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang difasilitasi	486 LKD	12 Desa	40.000.000	15 Desa	40.000.000	17 Desa	45.000.000	18 Desa	45.000.000	19 Desa	50.000.000		50.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek pengurus LKD dan LAD (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat)	81 Orang	4 Orang	40.000.000	8 Orang	45.000.000	15 Orang	55.000.000	20 Orang	65.000.000	25 Orang	65.000.000		65.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Output : Jumlah sarana dan prasarana lembaga masyarakat yang tersedia		12 Desa	50.000.000	15 Desa	50.000.000	17 Desa	50.000.000	18 Desa	50.000.000	19 Desa	50.000.000		50.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Meningkatkan PAD (Teridentifikasinya potensi ekonomi masyarakat desa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PADesa)	81 Desa	12 Desa	50.000.000	15 Desa	50.000.000	17 Desa	50.000.000	18 Desa	50.000.000	19 Desa	55.000.000	81 Desa	55.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna sebagai persiapan keikutsertaan dalam Pameran	0	10 Desa	50.000.000	15 Desa	55.000.000	17 Desa	55.000.000	18 Desa	55.000.000	19 Desa	55.000.000		55.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar	
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	30.000.000	1 Kali/Tahun	30.000.000	1 Kali/Tahun	30.000.000	1 Kali/Tahun	30.000.000	1 Kali/Tahun	30.000.000	1 Kali/Tahun	30.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar	
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan	Terselenggaranya Sistem Keamanan Lingkungan di Desa	-													-	-	

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Perlindungan Masyarakat																	
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya seluruh program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	551.088.900	1 Tahun	556.640.755	1 Tahun	566.831.717	1 Tahun	577.395.022		577.395.022	Dinas PMD	Kep. Selayar	
		2.13.04.	III. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	100%	695.000.000	100%	704.514.550	100%	722.148.549	100%	739.472.893	100%	757.116.716	100%	757.116.716			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Pemerintahan Desa			695.000.000		704.514.550		722.148.549		739.472.893		757.116.716		757.116.716			
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang administrasinya tertata dengan baik	81 Desa	16 Desa	40.000.000	16 Desa	46.000.000	16 Desa	50.500.000	16 Desa	55.000.000	17 Desa	55.000.000	81 Desa	55.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar	

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum tentang Desa yang tersusun	2 Produk Hukum	5 Produk hukum	25.000.000	5 Produk hukum	25.000.000	5 Produk hukum	30.000.000	5 Produk hukum	32.000.000	5 Produk hukum	33.000.000	5 Produk hukum	33.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.03	Pelaksanaan Penugasan Urusan/kewenangan kabupaten/kotayang Dilaksanakan Oleh Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang administrasinya tertata dengan baik	81Desa	16 Desa	50.000.000	16 Desa	57.500.000	16 Desa	58.000.000	16 Desa	60.000.000	17 Desa	86.000.000	81Desa	86.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta bimtek (sekretaris desa) yang meningkat pengetahuannya	81 Desa	16 Desa	30.000.000	16 Desa	34.500.000	16 Desa	35.000.000	16 Desa	40.000.000	17 Desa	52.000.000	81 Desa	52.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musyawarah Desa yang difasilitasi pelaksanaannya		12 Desa	20.000.000	15 Desa	20.000.000	-	-	18 Desa	25.000.000	19 Desa	25.000.000	64 Desa	25.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang diawasi dan dievaluasi perdesnya		16 Desa	20.000.000	16 Desa	20.000.000	-	-	16 Desa	25.000.000	17 Desa	25.000.000	65 Desa	25.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan	Tersusunnya Perbup tentang BUMDesa dan BUM Desma, dan		12 Desa	150.000.000	15 Desa	150.514.550	17 Desa	172.000.000	18 Desa	180.472.893	19 Desa	212.116.716	81 Desa	212.116.716	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Lembaga Kerja sama antar Desa	Konsep Pendirian BUM Desma															
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa		11 Desa	150.000.000	-	-	16 Desa	174.148.549	54 Desa	252.000.000	-	-	-	-	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			16 Desa	20.000.000	16 Desa	20.000.000	16 Desa	20.000.000	16 Desa	25.000.000	17 Desa	30.000.000	45 Desa	30.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi penyusunan data profilnya		16 Desa	20.000.000	16 Desa	25.000.000	16 Desa	27.500.000	-	-	17 Desa	30.000.000	45 Desa	30.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.12	fasilitasi Manajemen Pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina terkait penyelenggaraan manajemen pemerintahan desa		-	-	45 Desa	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aset Desa yang terinventarisir		-	-	45 Desa	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD (peserta bimtek) yang ditingkatkan kapasitasnya		2 kecamatan	30.000.000	2 kecamatan	37.500.000	2 kecamatan	40.000.000	2 kecamatan	45.000.000	2 kecamatan	50.000.000	10 kecamatan	50.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam penyusunan laporan		16 Desa	15.000.000	16 Desa	17.250.000	16 Desa	25.000.000	-	-	17 Desa	28.000.000	20 Desa	28.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.04.2.01.17	Fasilitasi Penyusunan perencanaan Pembangunan Desa	Tersusunnya Dokumen Road Map Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs)		45 Desa	50.000.000	36 Desa	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang Evaluasi dalam rangka mengikuti lomba desa tingkat propinsi		3 Desa	75.000.000	3 Desa	86.250.000	3 Desa	90.000.000	-	-	3 Desa	131.000.000	6 Desa	131.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.02.	IV. PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi		100%	45.000.000	100%	45.616.050	100%	46.757.820	100%	47.879.540	100%	49.021.946	100%	49.021.946		
		2.13.02.2.01.	PENYELENGGA RAAN PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi		12,34%	45.000.000	22,22%	45.616.050	34,57 %	46.757.820	43,21%	47.879.540	55,56 %	49.021.946		49.021.946		
		2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang meningkat statusnya berdasarkan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Tata Wilayah nya		5 Desa	15.000.000	10 Desa	15.616.050	13 Desa	16.757.820	15 Desa	17.879.540	20 Desa	19.021.946	63 Desa	19.021.946	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang diinventarisasi kewenangannya		5 Desa	15.000.000	8 Desa	15.000.000	15 Desa	15.000.000	20 Desa	15.000.000	25 Desa	15.000.000	73 Desa	15.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang didata sarana dan Prasarana pemerintahan desanya		5 Desa	15.000.000	10 Desa	15.000.000	12 Desa	15.000.000	16 Desa	15.000.000	18 Desa	15.000.000	61 Desa	15.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.03.	V. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa		3.7%	240.000.000	3.7%	243.285.600	3.7%	249.375.039	2.46%	255.357.546	2.46%	261.450.377	16.05%	261.450.377		
		2.13.03.2.01	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama antar Desa		18,52%	240.000.000	18,52%	243.285.600	18,52%	249.375.039	18,52%	255.357.546	18,52%	261.450.377	18,52%	261.450.377		
		2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten	Jumlah Desa yang dibina dalam rangka pengembangan kerjasama antar desa (Terbentuknya badan Kerjasama Antar Desa Tingkat Dalam kabupaten)	81 Desa	10 Desa	140.000.000	10 Desa	133.285.600	10 Desa	149.375.039	10 Desa	155.357.546	10 Desa	161.450.377	50 Desa	161.450.377	Dinas PMD	Kep. Selayar
		2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Fasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	81 Desa	5 Desa	100.000.000	5 Desa	110.000.000	5 Desa	100.000.000	5 Desa	100.000.000	5 Desa	100.000.000	25 Desa	100.000.000	Dinas PMD	Kep. Selayar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra PD				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		K	Rp	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C	CC		B		B		BB		BB		BB		
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	C		B		BB		BB		BB		BB		
				Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	sesuai SAP	sesuai SAP		sesuai SAP		sesuai SAP		sesuai SAP		sesuai SAP		sesuai SAP		
				Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perangkat daerah	75,4	75,4		76,61		77,8		79,9		81,1		81,1		
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50,91	63,03	3.567.393,000	70,28	3.616.230,610	70,53	3.706.744,862	71,51	3.795.669,672	72,31	3.886.234,350	72,31	18.572.272,494	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35	83		85		88		91		95		95		
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100	15.000,000	100	17.250,000	100	19.837,500	100	22.813,125	100	26.235,097	100	101,135,722	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	3.000,000	1	3.450,000	1	3.967,500	1	4.562,625	1	5.247,019	5	20,227,144	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,000,000	1	2,300,000	1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,000,000	1	2,300,000	1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,000,000	1	2,300,000	1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,000,000	1	2,300,000	1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2,000,000	2	2,300,000	2	2,645,000	2	3,041,750	2	3,498,013	10	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2,000,000	2	2,300,000	2	2,645,000	2	3,041,750	2	3,498,013	10	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	3,069,984,000	100	3,044,210,260	100	3,048,921,459	100	3,039,172,759	100	3,016,262,894	100	15,218,551,372	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	3,059,984,000	12	3,032,710,260	12	3,035,696,459	12	3,023,964,009	12	2,998,772,831	60	15,151,127,559	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	3,000,000	1	3,450,000	1	3,967,500	1	4,562,625	1	5,247,019	5	20,227,144	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5,000,000	1	5,750,000	1	6,612,500	1	7,604,375	1	8,745,031	5	33,711,906	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	1	1	2,000,000	1	2,300,000	1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
			Tanggapan Pemeriksaan	Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)														MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	2,000,000	100	2,300,000	100	2,645,000	100	3,041,750	100	3,498,013	100	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2,000,000	1	2,300,000	1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	0	9	20,000,000	9	23,000,000	9	26,450,000	13	30,417,500	13	34,980,126	53	134,847,626	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
				rasi Kepegawaian (Dokumen)															
		0.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	10,000,000	2	11,500,000	2	13,225,000	2	15,208,750	2	17,490,063	10	67,423,813	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti	2	2	10,000,000	2	11,500,000	2	13,225,000	2	15,208,750	2	17,490,063	10	67,423,813	0	DINAS PEMBERDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)														MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100	100	305,409,000	100	351,220,350	100	403,903,403	100	464,488,913	100	534,162,250	100	2,059,183,916	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15,000,000	1	17,250,000	1	19,837,500	1	22,813,125	1	26,235,094	5	101,135,719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	47,909,000	1	55,095,350	1	63,359,653	1	72,863,600	1	83,793,140	5	323,020,743	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	7,500,000	1	8,625,000	1	9,918,750	1	11,406,563	1	13,117,547	5	50,567,860	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7,000,000	1	8,050,000	1	9,257,500	1	10,646,125	1	12,243,044	5	47,196,669	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1	1	5,000,000	1	5,750,000	1	6,612,500	1	7,604,375	1	8,745,031	5	33,711,906	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan (Dokumen)															
		0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	7,000,000	1	8,050,000	1	9,257,500	1	10,646,125	1	12,243,044	5	47,196,669	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	216,000,000	1	248,400,000	1	285,660,000	1	328,509,000	1	377,785,350	5	1,456,354,350	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100	100	40,000,000	100	46,000,000	100	52,900,000	100	60,835,000	100	69,960,251	100	269,695,251	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	15,000,000	1	17,250,000	1	19,837,500	1	22,813,125	1	26,235,094	5	101,135,719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	1	7,000,000	1	8,050,000	1	9,257,500	1	10,646,125	1	12,243,044	5	47,196,669	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	3	18,000,000	3	20,700,000	3	23,805,000	3	27,375,750	3	31,482,113	15	121,362,863	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	65,000,000	100	74,750,000	100	85,962,500	100	98,856,875	100	113,685,406	100	438,254,781	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	65,000,000	1	74,750,000	1	85,962,500	1	98,856,875	1	113,685,406	5	438,254,781	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	100	50,000,000	100	57,500,000	100	66,125,000	100	76,043,750	100	87,450,313	100	337,119,063	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			Pemerintahan Daerah																
		0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	25,000,000	1	28,750,000	1	33,062,500	1	38,021,875	1	43,725,156	5	168,559,531	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	15,000,000	16	17,250,000	16	19,837,500	16	22,813,125	16	26,235,094	80	101,135,719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	10,000,000	15	11,500,000	15	13,225,000	15	15,208,750	15	17,490,063	75	67,423,813	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
				Pelayanan (Unit Kerja)															
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perdesaan				Persentase Desa yang meningkat statusnya	6,17	6,17	5,357,393,000	12,34	5,430,735,710	12,34	5,566,667,025	12,34	5,700,211,368	12,34	5,836,218,411	12,34	27,891,225,514		
Meningkatnya Status Perkembangan Desa				Persentase Desa berstatus sangat tertinggal	0	0	5,357,393,000	0	5,430,735,710	0	5,566,667,025	0	5,700,211,368	0	5,836,218,411	0	27,891,225,514		
				Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	14,82	14,81		11,1		7,4		3,7		0		0			
				Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	54,3	54,3		56,7		58		59		60,5		60,5			
				Persentase Desa Berstatus Maju	0	27,2		27,2		27,2		27,2		27,2		27,2			
				Persentase Desa berstatus Mandiri	0	3,7		4,9		7,4		9,8		12,3		12,3			
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi	100	100	45,000,000	100	45,616,050	100	46,757,820	100	47,879,540	100	49,021,946	100	234,275,356	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	24,69	6,17	45,000,000	9,87	45,616,050	8,647	46,757,820	9,87	47,879,540	9,87	49,021,946	45,67	234,275,356	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi	20	5	15,000,000	8	15,616,050	7	16,757,820	8	17,879,540	10	19,021,946	38	84,275,356	DINAS PEMBERDAYAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
				Penataan Wilayahnya (Desa)														MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	0	5	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	37	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Unit)	0	5	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	37	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	3,7	3,7	240,000,000	3,7	243,285,600	3,7	249,375,039	2,46	255,357,546	2,46	261,450,377	16,05	1,249,468,562	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerjasama yang difasilitasi	2	3	240,000,000	3	243,285,600	3	249,375,039	3	255,357,546	3	261,450,377	15	1,249,468,562	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	140,000,000	2	133,285,600	2	149,375,039	2	155,357,546	2	161,450,377	10	739,468,562	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam	0	1	100,000,000	1	110,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	510,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Dokumen)															
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	100	100	695,000,000	100	704,514,550	100	722,148,549	100	739,472,893	100	757,116,716	100	3,618,252,708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina	100	100	695,000,000	100	704,514,550	100	722,148,549	100	739,472,893	100	757,116,716	100	3,618,252,708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	40,000,000	1	46,000,000	1	47,000,000	1	51,000,000	1	55,000,000	5	239,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2	5	25,000,000	5	25,000,000	5	26,000,000	5	30,000,000	5	33,000,000	25	139,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	50,000,000	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	2	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	1	50,000,000	1	57,500,000	1	58,000,000	1	59,000,000	1	86,000,000	5	310,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	81	16	30,000,000	16	34,500,000	16	35,000,000	16	36,000,000	17	52,000,000	81	187,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	21,000,000	1	25,000,000	5	106,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1	1	20,000,000	1	20,000,000	0	0	1	21,000,000	1	25,000,000	4	86,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1	1	150,000,000	1	150,514,550	1	170,000,000	1	172,472,893	1	212,116,716	5	855,104,159	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1	1	150,000,000	0	0	1	170,648,549	1	235,000,000	0	0	3	555,648,549	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	21,000,000	1	30,000,000	5	111,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	1	1	20,000,000	1	25,000,000	1	27,500,000	1	27,000,000	1	30,000,000	5	129,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	0	0	1	85,000,000	0	0	0	0	0	0	1	85,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	0	0	1	30,000,000	0	0	0	0	0	1	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (Orang)	40	36	30,000,000	45	37,500,000	36	38,000,000	36	41,000,000	81	50,000,000	234	196,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1	1	15,000,000	1	17,250,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	5	105,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	75,000,000	1	86,250,000	1	90,000,000	0	0	1	131,000,000	4	382,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	33,33	33,33	810,000,000	33,33	821,088,900	33,33	841,640,755	33,33	861,831,717	33,33	882,395,022	33,33	4,216,956,394	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	33	33	810,000,000	33	821,088,900	33	841,640,755	33	861,831,717	33	882,395,022	33	4,216,956,394	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	20	1	40,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	40	40	40,000,000	40	45,000,000	40	55,000,000	40	65,000,000	40	65,000,000	200	270,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	0	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	100	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)															
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	5	255,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	5	270,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	1	550,000,000	1	551,088,900	1	556,640,755	1	566,831,717	1	577,395,022	5	2,801,956,394	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Total								5,357,393,000		5,430,735,710		5,566,667,025		5,700,211,368		5,836,218,411		27,891,225,514	

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900-1.15.5-1317 Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C					B		BB		BB		BB		
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C					BB		BB		BB		BB		
				Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	sesuai SAP					sesuai SAP		sesuai SAP		sesuai SAP		sesuai SAP		
				Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perangkat daerah	75,4					77,8		79,9		81,1		81,1		
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50,91					70,53	3,706,744,862	71,51	3,795,669,672	72,31	3,886,234,350	72,31	18,572,272,494	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35					88		91		95		95		
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100					100	19,837,500	100	22,813,125	100	26,235,097	100	101,135,722	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1					1	3,967,500	1	4,562,625	1	5,247,019	5	20,227,144	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			Perangkat Daerah																
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1					1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1					1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1					1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1					1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2					2	2,645,000	2	3,041,750	2	3,498,013	10	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
				Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)															
		0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2					2	2,645,000	2	3,041,750	2	3,498,013	10	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100					100	3,048,921,459	100	3,039,172,759	100	3,016,262,894	100	15,218,551,372	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12					12	3,035,696,459	12	3,023,964,009	12	2,998,772,831	60	15,151,127,559	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1					1	3,967,500	1	4,562,625	1	5,247,019	5	20,227,144	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1					1	6,612,500	1	7,604,375	1	8,745,031	5	33,711,906	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					(6)	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1					1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100					100	2,645,000	100	3,041,750	100	3,498,013	100	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
				Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)															
		0.00.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1					1	2,645,000	1	3,041,750	1	3,498,013	5	13,484,763	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			Kebijakan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah (Dokumen)															
		0.00.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	0					9	26,450,000	13	30,417,500	13	34,980,126	53	134,847,626	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			AtributKelengkapannya	AtributKelengkapan (Paket)															
		0.00.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdminist rasi Kepegawaian (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksana kan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yangMeninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2					2	13,225,000	2	15,208,750	2	17,490,063	10	67,423,813	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
			Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)														MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2					2	13,225,000	2	15,208,750	2	17,490,063	10	67,423,813	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100					100	403,903,403	100	464,488,913	100	534,162,250	100	2,059,183,916	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1					1	19,837,500	1	22,813,125	1	26,235,094	5	101,135,719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1					1	63,359,653	1	72,863,600	1	83,793,140	5	323,020,743	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1					1	9,918,750	1	11,406,563	1	13,117,547	5	50,567,860	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1					1	9,257,500	1	10,646,125	1	12,243,044	5	47,196,669	DINAS PEMBERDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
			dan Penggandaan	Penggandaanyang Disediakan (Paket)														MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1					1	6,612,500	1	7,604,375	1	8,745,031	5	33,711,906	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1					1	9,257,500	1	10,646,125	1	12,243,044	5	47,196,669	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1					1	285,660,000	1	328,509,000	1	377,785,350	5	1,456,354,350	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100					100	52,900,000	100	60,835,000	100	69,960,251	100	269,695,251	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1					1	19,837,500	1	22,813,125	1	26,235,094	5	101,135,719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11					1	9,257,500	1	10,646,125	1	12,243,044	5	47,196,669	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7					3	23,805,000	3	27,375,750	3	31,482,113	15	121,362,863	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100					100	85,962,500	100	98,856,875	100	113,685,406	100	438,254,781	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1					1	85,962,500	1	98,856,875	1	113,685,406	5	438,254,781	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100					100	66,125,000	100	76,043,750	100	87,450,313	100	337,119,063	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1					1	33,062,500	1	38,021,875	1	43,725,156	5	168,559,531	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16					16	19,837,500	16	22,813,125	16	26,235,094	80	101,135,719	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
																			MASYARAKAT DAN DESA
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15					15	13,225,000	15	15,208,750	15	17,490,063	75	67,423,813	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
																		MASYARAKAT DAN DESA	
		0.00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Perdesaan				Persentase Desa yang meningkat statusnya	6,17					12,34	5,566,667,025	12,34	5,700,211,368	12,34	5,836,218,411	12,34	27,891,225,514		
	Meningkatnya Status Perkembangan Desa			Persentase Desa berstatus sangat tertinggal	0					0	5,566,667,025	0	5,700,211,368	0	5,836,218,411	0	27,891,225,514		
				Persentase Desa berstatus Desa Tertinggal	14,82					7,4		3,7		0		0			
					Persentase Desa berstatus Desa Berkembang	54,3					58		59		60,5		60,5		
					Persentase Desa Berstatus Maju	0					27,2		27,2		27,2		27,2		
					Persentase Desa berstatus Mandiri	0					7,4		9,8		12,3		12,3		
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan penyelenggaraan penataan desa yang difasilitasi	100					100	46,757,820	100	47,879,540	100	49,021,946	100	234,275,356	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	24,69					8,647	46,757,820	9,87	47,879,540	9,87	49,021,946	45,67	234,275,356	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
				Perubahan Status Desa (Desa)															
		2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	20					7	16,757,820	8	17,879,540	10	19,021,946	38	84,275,356		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	0					8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	37	75,000,000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (Unit)	0					8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	37	75,000,000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.02.3.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi															
		2.13.02.3.01.007	Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan penetapan status kampung adat Yang Dilaksanakan															
		2.13.02.3.01.008	Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	Tersedianya pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
			kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota Tang ditetapkan														
		2.13.02.3.01.009	Pelaksanaan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditugaskan kepada kampung/kampung adat	Jumlah laporan penugasan urusan konkuren pemerintah provinsi kepada kampung/kampung adat														
		2.13.02.3.01.010	Pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	Jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat														
		2.13.02.3.01.011	Fasilitasi penataan kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung	Jumlah peraturan kampung/kampung adat tentang kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung/kampung adat yang telah ditetapkan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	3,7					3,7	249,375,03 ₉	2,46	255,357,54 ₆	2,46	261,450,377	16,05	1,249,468,562	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerjasama yang difasilitasi	2					3	249,375,03 ₉	3	255,357,54 ₆	3	261,450,377	15	1,249,468,562	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	2					2	149,375,03 ₉	2	155,357,54 ₆	2	161,450,377	10	739,468,562	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0					1	100,000,00 ₀	1	100,000,00 ₀	1	100,000,000	5	510,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.03.3.01	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah Dokumen Kerjasama yang difasilitasi														
		2.13.03.3.01.004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antar kampung maupun kerjasama														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			samaantarKampung maupun kerjasama Kampung dengan pihakketiga dalam 1 (satu) daerahkabupaten / kota	Kampung dengan pihakketiga dalam 1 (satu) daerahkabupaten/ kota															
		2.13.03.3.01.005	Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung															
		2.13.03.3.01.006	Koordinasi hasil pelaksanaanPeraturan Bersama KepalaKampung atau PerjanjianBersama	Jumlah Dokumen hasil Koordinasipelaksanaan Peraturan BersamaKepala Kampung atau PerjanjianBersama															
		2.13.03.3.01.007	Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota															
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI	Cakupan administrasi	100					100	722,148,549	100	739,472,893	100	757,116,716	100	3,618,252,708	DINAS PEMBERDAYAAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
			PEMERINTAHAN DESA	pemerintahan desa yang difasilitasi														MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina	100					100	722,148,549	100	739,472,893	100	757,116,716	100	3,618,252,708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1					1	47,000,000	1	51,000,000	1	55,000,000	5	239,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2					5	26,000,000	5	30,000,000	5	33,000,000	25	139,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1					0	0	0	0	0	0	2	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1					1	58,000,000	1	59,000,000	1	86,000,000	5	310,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	81					16	35,000,000	16	36,000,000	17	52,000,000	81	187,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1					1	20,000,000	1	21,000,000	1	25,000,000	5	106,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1					0	0	1	21,000,000	1	25,000,000	4	86,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	1					1	170,000,000	1	172,472,893	1	212,116,716	5	855,104,159	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1					1	170,648,549	1	235,000,000	0	0	3	555,648,549	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	1					1	20,000,000	1	21,000,000	1	30,000,000	5	111,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	1					1	27,500,000	1	27,000,000	1	30,000,000	5	129,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1					0	0	0	0	0	0	1	85,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1					0	0	0	0	0	0	1	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	40					36	38,000,000	36	41,000,000	81	50,000,000	234	196,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
				tan Kapasitas (Orang)														
		2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1					1	20,000,000	1	25,000,000	1	28,000,000	5	105,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1					1	90,000,000	0	0	1	131,000,000	4	382,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.04.3.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina														
		2.13.04.3.01.19	Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
				adat Yang Ditetapkan														
		2.13.04.3.01.20	Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan														
		2.13.04.3.01.21	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan														
		2.13.04.3.01.22	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat	Jumlah kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat Yang Ditetapkan														
		2.13.04.3.01.23	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		2.13.04.3.01.24	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan															
		2.13.04.3.01.25	Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota;	Jumlah Laporan Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan															
		2.13.04.3.01.26	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan															
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	33,33					33,33	841,640,755	33,33	861,831,717	33,33	882,395,022	33,33	4,216,956,394	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	33					33	841,640,755	33	861,831,717	33	882,395,022	33	4,216,956,394	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	20					1	45,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	220,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40					40	55,000,000	40	65,000,000	40	65,000,000	200	270,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
			dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)														
		2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	0					20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	100	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	5	255,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1					1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	5	270,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					(6)	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1					1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	0					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1					1	556,640,755	1	566,831,717	1	577,395,022	5	2,801,956,394	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
		2.13.05.2.01.011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															
		2.13.05.3.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan															
		2.13.05.3.01.0012	Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun															
		2.13.05.3.01.0013	Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan	Jumlah pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
			Kampung tentang LKK/LAK.	Kampung tentang LKK/LAK															
		2.13.05.3.01.0014	Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik															
		2.13.05.3.01.0015	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Yang Ditetapkan															
		2.13.08	PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN																
		2.13.08.3.01	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan																
		2.13.08.3.01.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		2.13.08.3.01.002	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan															
		2.13.08.3.02	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi																
		2.13.08.3.02.001	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana															
Total										5,566,667,025		5,700,211,368		5,836,218,411			27,891,225,514		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel. 7.1 (TC-28) berikut ini :

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2022-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	0	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	33,33%
2.	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	0	3.7%	3.7%	3.7%	2.46%	2.46%	16.05%

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Indikator Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2022-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan	5	2	4	6	8	10	10
2.	Jumlah Desa Tertinggal	34	32	30	28	26	24	24
3.	Jumlah Desa Mandiri	0	1	1	2	2	3	3

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan dalam periode tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dengan kata lain merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan pahu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Rennstra. Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara, untuk pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Renstra ini tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian–penyesuaian seperlunya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Benteng, 1 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19800422 199912 1 003

